

# AKTIVA

Journal of Accountancy and Management



**AKTIVA: Journal of Accountancy and Management** merupakan jurnal *open access* yang menerbitkan hasil penelitian dan kajian dalam bidang akuntansi dan manajemen, meliputi akuntansi syariah, akuntansi sektor publik, akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, manajemen syariah, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen operasional, dan kewirausahaan (*entrepreneurship*). **AKTIVA: Journal of Accountancy and Management** terbit dua kali dalam satu tahun pada bulan Januari dan Juli.

Pelindung/Penanggungjawab	: Rektor IAIN Pontianak Dr. Cucu, M.Ag.
Pengarah	: Sabirin, M.Ak.
Pimpinan Redaksi	: Dewa Ruci, M.Ak.
Dewan Redaksi	: Ari Yunaldi, M.Sos.; M. Agus Muhtadi Bilhaq, M.Ag.; Muhammad Tezar, M.Ak.; Novita, SE, MM; Aulia Azimi, SE., ME.; Pratiwi Kurniati, S.E., M.Ak; Nur Atiqah, S.E., M.M.; Syarif Agus Al Qadri, MM.; Wulan Wahyu Ningrum, S.E., M. Ak.
Mitra Bestari	: Helti Nur Aisyiah, M.Si (UIN Raden Mas Said Surakarta); Ali Rama, Ph.D (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta); Elok Heniwati, S.E., M.Si., Ak., CA., Ph.D (Universitas Tanjungpura Pontianak); Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., E.Sy (IAIN Palangkaraya); Henri Prasetyo, S.E., M.Ak (Politeknik Negeri Pontianak); Dra. Febriati, MM (Universitas Panca Bhakti Pontianak); Dr. Wendy, SE., M.Sc (Universitas Tanjungpura Pontianak); Zulfikar, S.E., M.P.A (Politeknik Negeri Pontianak) Amalia Nur Chasanah, SE., MM (Universitas Dian Nuswantoro Semarang)
Korektor Naskah	: Mualimin, M.Sos (IAIN Palangkaraya)
Sekretariat	: Sahala Harahap, S.HI

#### Alamat Redaksi:

Rumah Jurnal IAIN Pontianak, Gedung Rektorat  
Jl. Letjend Suprpto No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78122  
Email : [aktivafebi.iainptk@gmail.com](mailto:aktivafebi.iainptk@gmail.com)

## DAFTAR ISI

**Analisis Tingkat Efisiensi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS  
untuk Periode Tahun 2013 Hingga 2017**

Hani Meilita Purnama Subardi

1 - 11

**Pengukuran Risiko Operasional dengan Pendekatan BIA dan SA  
Pada PT. Bank Muamalat**

Nur Atiqah, Yulia, Lina Afiyana

12 - 20

**Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar dan BI Rate  
Terhadap Inflasi di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Daya Beli Masyarakat**

Silvia Puspita Sari, Syamratun Nurjannah

21 - 29

**Pengaruh Etika Profesi dan *Fee Audit* Terhadap Kualitas Audit**

Sabirin, Aulia Azimi, Harry Wahyudi

30 - 42

**Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Pengumpulan Zakat  
Pada Baznas Kalbar**

Verdianti, Puja

43 - 53

**Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Perspektif *Al-Muraqabah* Pada  
Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara 2020**

Pratiwi Kurniati, Devi Apriani

54 - 67

## Analisis Tingkat Efisiensi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS untuk periode tahun 2013 hingga 2017

Hani Meilita Purnama Subardi

IAIN Pontianak

[hanimeilita@gmail.com](mailto:hanimeilita@gmail.com)

### ABSTRAK

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dari pengelolaan dana zakat yang telah dihimpun dan didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Nasional pada periode 2013 hingga 2017.

**Desain / metodologi / pendekatan:** Analisis pada tingkat efisiensi ini diolah menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan produksi. Variabel Output yang digunakan meliputi dana terhimpun dan dana tersalurkan. Sedangkan variabel input yang digunakan adalah Biaya Personalia, Biaya Operasional dan Biaya Sosialisasi.

**Temuan Penelitian:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari tahun 2013 hingga tahun 2017 BAZNAS sempat mengalami inefisiensi pada tahun 2013 sebesar 84,73% dan pada tahun 2015 sebesar 75,14%.

**Kontribusi Teoretis / Orisinalitas:** Kontribusi penelitian ini dapat menjadi alat evaluasi bagi Badan Pengelola Zakat dalam hal mengelola dana dan mentaur strategi dalam penghimpunan dan penyaluran dana lebih baik lagi.

**Keterbatasan dan implikasi penelitian:** Penelitian ini masih terbatas pada analisis tingkat efisiensi pada pengelolaan dana zakat. Sehingga perlu diadakan penelitian lanjutan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang telah dikelola.

**Kata kunci:** Efisiensi, Badan Pengelola Zakat, *Data Envelopment Analysis*.

---

### PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu diantara lima pilar rukun islam yang menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim dengan cara menghibahkan sejumlah harta yang sudah mencapai nisab dan haul dengan mekanisme dan persyaratan tertentu yang akan diberikan kepada penerima manfaat untuk mencapai pada *maqashid syariah* yakni menjamin tercapainya keadilan sosial ekonomi (Razimi dkk, 2016). Menurut *fiqh al-zakat* salah satu manfaat sosial yang melekat pada zakat yakni adanya distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil sehingga tujuan jangka panjang dari zakat ini untuk meningkatkan status sosial ataupun taraf hidup para penerima manfaat (*mustabiq*) sehingga lebih sejahtera. Dengan tujuan tersebut memperlihatkan bahwa urgensi zakat bukan hanya dapat memperbaiki perekonomian penerima zakat, namun juga sebagai alat dalam peningkatan ekonomi nasional.

Berdasarkan publikasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan Bank Dunia pada tahun 2018 tentang Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia yang dapat dilihat pada gambar 1.1.

**Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia:**

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kemiskinan Relatif</b> (% dari populasi)	11.5	11.0	11.2	10.7	10.1
<b>Kemiskinan Absolut</b> (dalam jutaan)	28.6	27.7	28.5	27.8	26.6
<b>Koefisien Gini/ Rasio Gini</b>	0.41	0.41	0.41	0.40	0.39

**Gambar 1.1 Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia**

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Bank Dunia

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kemiskinan relatif yang terjadi pada tahun 2017 sebesar 10,1% atau sebesar 26,6 juta jiwa penduduk. Sedangkan pada koefisien gini di tahun yang sama sebesar 0,39 (BPS,2018). Hasil ini menunjukkan sebesar 45,1% aset nasional dikuasai oleh 1% penduduk Indonesia. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan dalam pendistribusian kesejahteraan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi umat muslim terbesar di dunia, idelanya dapat menghidupkan dan mengembangkan lembaga pengelola zakat dalam perekonomian Indonesia. Terdapat harapan besar pada institusi zakat agar dapat menjadi faktor penunjang dalam mengurangi tingkat kesenjangan sosial serta dapat menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Selanjutnya organisasi pengelola zakat diharapkan juga mampu melayani para pemberi dan penerima zakat secara efisien dan efektif (BAZNAS,2016).

Terdapat berbagai penelitian terkait potensi dan pengelolaan dana zakat diantaranya yakni pada tahun 2009 yang dilakukan oleh Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Indonesia, menunjukkan proyeksi potensi dana zakat yang mencapai 12,7 triliun. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS bekerja sama dengan IPB pada tahun 2011 yang berjudul *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia* menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara proyeksi dana zakat yang terhimpun sebesar Rp217 triliun namun yang terjadi di lapangan, dana yang terhimpun hanya sebesar 1% dari potensi zakat yang sebenarnya.

Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa terjadi kesenjangan yang cukup besar antara potensi penghimpunan dana zakat dan realisasi dana yang terhimpun. Data teraktual dari BAZNAS menunjukkan pada tahun 2015 total secara kumulatif untuk dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf pada skala nasional hanya terkumpul sebesar Rp 3,7 triliun atau dapat dikatakan kurang dari 1,3 persen dari proyeksinya. Hasil dari data yang telah dihimpun dan diolah oleh BAZNAS memperlihatkan bahwa pada tahun 2014 realisasi penerimaan zakat di Indonesia sebesar 3,2 triliun (Sitorus, 2015) sedangkan untuk tahun 2015 dan 2016 terjadi peningkatan dalam jumlah penghimpunan dana zakat yakni dari Rp3.65 triliun menjadi Rp5 triliun.

Di tahun 2016 tingkat daya serap pengelolaan dana zakat sebesar 58,42% yang mana secara kumulatif total penghimpunan dana mencapai Rp5.017.293.126.950 dengan total pendistribusian sebesar Rp2.931.156.809.405. selanjutnya adana yang masih tersisa pada tahun tersebut yang belum tersalurkan, akan didistribusikan pada tahun selanjutnya. Kualitas penyaluran zakat ini perlu untuk terus ditingkatkan menuju nilai efektif (>70-90%) dan sangat efektif (>90%) melalui peningkatan kapasitas penyaluran zakat OPZ baik dengan berbagai kegiatan yang memiliki sifat konsumtif dalam

jangka waktu yang pendek, maupun melalui program-program produktif, memberdayakan dan memiliki dampak jangka panjang.

Organisasi saat ini menghadapi tantangan yang membutuhkan keputusan manajemen yang efektif yang akan mencapai tingkat produktivitas dan efisiensi yang tinggi (Wahab, 2013). Pada penelitian ini, tingkat efisiensi badan pengelola zakat akan ditinjau sebagai salah satu dari alat penilaian kinerja. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk mengadakan penelitian tentang Analisis Tingkat Efisiensi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat pada BAZNAS untuk periode tahun 2013 hingga 2017.

## TINJAUAN PUSTAKA

### ***Shariah Enterprise Theory (SET)***

*Shariah enterprise theory* merupakan sebuah teori yang mengakui tentang konsep hubungan secara vertical maupun horizontal. Dimana pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di muka bumi ini mencakup hubungan secara vertikal yakni kepada Allah Swt selaku pencipta dan juga secara horizontal yakni dengan sesama makhluk dan lingkungan sekitar. Itu artinya pemaknaan konsep akunabilitas dalam penelitian ini menekankan pada sistem pengelolaan akuntansi zakat yang merupakan amanah dari Allah yang harus dijalankan sesuai dengan kejujuran berniat, kejujuran lahiriah serta kejujuran batiniah (Triyuwono, 2006).

*Syariah enterprise theory* melihat bahwa pengumpulan dana ZIS yang dilakukan tidak serta merta dilihat dari aspek fisiknya melainkan dari niat dalam hati, dan rasa ikhlas karena memberikan pelayanan. Hal ini di dalam *syariah enterprise theory*, Allah merupakan sumber amanah yang paling utama (Meutia, 2010). Keamanan ini diwujudkan karena bentuk transparansi (keterbukaan) merupakan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islam.

### **Efisiensi**

Efisiensi di dalam ekonomi adalah ketika semua barang dan faktor produksi dalam suatu aktivitas ekonomi dapat didistribusikan ataupun dialokasikan secara tepat dan minim pemborosan. Menurut Karim (2011) efisien artinya melakukan sesuatu secara tepat atau dapat dikatakan usaha dalam melakukan berbagai hal secara tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Efisiensi dalam kacamata produksi berada dalam cakupan teknis dan operasional, yakni mengubah input menjadi output. Adapun berdasarkan sisi ekonomi, efisiensi merupakan pengalokasian sumberdaya di dalam perekonomian yang dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat (Sukirno, 2015).

### **Zakat**

Berdasarkan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah menjelaskan bahwa Zakat merupakan harta yang wajib diberikan oleh *muḥakki* berdasarkan aturan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Adapun menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mengartikan zakat sebagai harta yang hukumnya wajib diserahkan oleh umat muslimm atau badan usaha untuk diberikan kepada kelompok yang berhak mendapatkannya sesuai dengan aturan hukum islam yang berlaku.

Dari aspek sosial dan ekonomi, tujuan yang mendasari zakat yakni untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial antara golongan kaya dan miskin melalui sistem distribusi zakat yang tepat dan menyeluruh diharapkan bisa menjadi solusi terhadap permasalahan sosial yang terjadi (Qardawi, 2004).

### **Data Envelopment Analysis (DEA)**

*Data envelopment analysis* merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan efisiensi unit organisasi homogen yang disebut dengan DMU (*Decision Making Unit*) yang menggunakan input yang sama untuk menghasilkan output yang sama. DEA mengambil nilai input dan output yang diamati untuk membentuk ruang kemungkinan produksi yang dibandingkan dengan masing-masing unit untuk menentukan efisiensinya.

Metode DEA ini cocok diterapkan ke lembaga zakat karena berhasil digunakan sebagai indikator efisiensi sektor organisasi nirlaba dan publik. Kemudian, Norazlina & Abdul Rahim (2013) menilai pertumbuhan produktivitas lembaga zakat dengan menggunakan *variabel return to scale* (VRS) dan menemukan bahwa sebagian besar lembaga zakat beroperasi di non-CRS (*Constant Return Scale*). Dengan demikian, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak perbaikan oleh lembaga zakat untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

### **Gap Pada Penelitian Tingkat Efisiensi pada Badan Pengelola Zakat**

Penelitian tentang analisis tingkat efisiensi pada lembaga zakat di Indonesia berawal dari Nasher Akbar (2009) yang berjudul Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan Pendekatan *data envelopment analysis* dengan menggunakan variabel output dana tersalurkan, dana terhimpun serta variabel input Biaya operasional, biaya sosialisasi dan operasional. Hasil studi menunjukkan efisiensi OPZ pada tahun 2005 masih lebih baik dari tahun 2006 dan 2007 dengan skor *overall* 71,27%. Penyebab utama inefisiensi pada tahun 2006 dan 2007 adalah tidak optimalnya dana tersalurkan dan dana terhimpun. Selanjutnya Selanjutnya, Wahyuni (2016) meneliti terkait efisiensi organisasi pengelola zakat nasional dengan metode *data envelopment analysis* dengan variabel input biaya personalia, biaya operasional, biaya sosialisasi ziswaf dan variabel output dana ziswaf yang disalurkan, aktiva tetap, aktiva lancar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pada OPZ Nasional menggunakan pendekatan intermediasi memperlihatkan kinerja yang efisien pada BAZNAS, Dompot Dhuafa, Lazis NU dan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Adapun inefisiensi ditunjukkan pada kinerja BAZNAS dan Dompot Duafa pada variabel biaya operasional, biaya personalia, biaya sosialisasi ziswaf dan dana ziswaf yang disalurkan.

Al-ayubi et. al (2018) meneliti tingkat efisiensi lembaga zakat dengan judul, *Examining the Efficiency of Zakat Management: Indonesian Zakat Institutions Experiences*. Dengan variabel yang lebih bervariasi yakni jumlah amil, jumlah sukarelawan, biaya personalia, biaya operasional, biaya sosialisasi, jumlah kantor sebagai variabel input dan jumlah zakat yang dihimpun, jumlah distribusi zakat, jumlah *mustahiq*, jumlah *muzakki*, jumlah distribusi zakat yang produktif sebagai variabel output. Penelitian yang menggunakan DEA ini menghasilkan tingkat efisiensi lembaga zakat pada tahun 2011-2013 mengalami peningkatan namun kemudian menurun pada tahun 2014-2016. Efisiensi IZI mengalami kenaikan selama 2011-2012 kemudian sedikit menurun pada 2013. Meskipun efisiensi meningkat di tahun 2014-2015 namun terjadi penurunan pada tahun 2016. Setelah periode fluktuasi selama 2011-2013, efisiensi skala IZI menurun pada tahun 2014 dan stabil pada tahun 2015-2016.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode dan Objek Penelitian**

Metode penelitian deskriptif kuantitatif merupakan sebuah metode yang menggambarkan suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka. Tahapan pengolahan yang dimulai dengan pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya. Data yang

digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan BAZNAS yang mempublikasikan laporan tahunannya melalui laman resminya selama periode 2013 hingga 2017.

### Jenis dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yakni variabel input dan output dengan menggunakan pendekatan produksi. Dimana variabel input yang digunakan adalah Biaya Personalia, Biaya Sosialisasi dan Biaya Operasional lainnya. Adapun variabel output yang digunakan pada penelitian ini yakni dana terhimpun dan dana tersalurkan. Data operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

<b>Variabel Input</b>	<b>Definisi</b>	<b>Sumber Data</b>
Input 1 ( $X_1$ )	Biaya Personalia	Laporan Perubahan Dana Amil
Input 2 ( $X_2$ )	Biaya Sosialisasi	Laporan Perubahan Dana Amil
Input 3 ( $X_3$ )	Biaya Operasional Lainnya	Laporan Perubahan Dana Amil
<b>Variabel Output</b>	<b>Definisi</b>	<b>Sumber Data</b>
Output 1 ( $Y_1$ )	Dana Terhimpun	Laporan Perubahan Dana
Output 2 ( $Y_2$ )	Dana Tersalurkan	Laporan Perubahan Dana

Sumber : Data Olahan, 2018

### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan seseorang dan bukan peneliti yang melakukan studi mukhtakhir (Sekaran, 2017). Data sekunder bisa saja dari data internal amupun eksternal organisasi yang dapat diakses melalui internet, penelusuran dokumen, atau publikasi informasi seperti laporan keunagan dan lain-lain.

### Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Data yang diambil pada penelitian ini berasal dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional secara konsisten dari tahun 2013 hingga tahun 2017 di situs resminya. Selain itu juga dilakukan telaah pustaka, yaitu mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa jurnal, buku, dan sumber informasi lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

### Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk mengukur efisiensi dalam penelitian ini adalah *Data Envelopment Analysis*. DEA dipilih karena telah distandarisasi sebagai alat untuk mengukur kinerja dan efisiensi suatu unit. Seluruh variabel input dan output menggunakan *Software Warwick* DEA, sehingga diperoleh tingkat efisiensi setiap Organisasi Pengelola Zakat dari pendekatan produksi. Efisiensi ditunjukkan dengan skor 100% yang berarti efisien dan kurang dari 100% menunjukkan adanya inefisiensi. Dapat dilihat pula variabel apa saja yang kurang efisien dalam pengelolaannya,

sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak yang bersangkutan dalam mengambil keputusan. Secara matematis formulasi DEA dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Es = \frac{\sum_{i=1}^m U_i Y_{is}}{\sum_{j=1}^{nm} V_j X_{js}}$$

Keterangan :

Es = Efisiensi BPZ s

M = Output BPZ s yang diamati

N = Input BPZ s yang diamati

Y<sub>is</sub> = Jumlah Output ke i yang dihasilkan

X<sub>js</sub> = Jumlah input ke j yang digunakan

U<sub>i</sub> = s x 1 jumlah bobot output

V<sub>j</sub> = s x 1 jumlah bobot input

## HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini menggunakan alat analisis DEA dengan menggunakan *Software Warwick* DEA. Pengukuran efisiensi pada Badan Pengelola Zakat didasarkan pada orientasi output. Tujuan pemilihan orientasi output karena untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Badan Pengelola Zakat dalam menghimpun dana Zakat dan menyalurkannya dengan sejumlah input tertentu. Pendekatan output dirasa lebih tepat digunakan untuk Badan Pengelola Zakat sebagai alat evaluasi bagi amilin dalam mengukur kinerja mereka dalam hal penghimpunan dan penyaluran serta dapat menentukan prioritas variabel yang harus ditingkatkan dari sisi output.

Skor efisiensi yang digunakan antara 0 dan 100% dengan tingkat efisiensi yang sempurna ketika mencapai 100%. Sebuah organisasi pengelola zakat dapat dikatakan efisien bila nilainya semakin mendekati dan mencapai angka 100%. Pencapaian angka 100% menunjukkan OPZ beroperasi pada ukuran skala terbaik. Semakin ia menjauh dari angka 100% maka semakin tidak efisien atau masih terdapat inefisiensi skala yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. Terdapat tiga kondisi dalam hasil perhitungan DEA yang ditunjukkan pada tabel 1.2

**Tabel 1.2**  
**Kondisi Efisiensi Hasil Perhitungan DEA**

NO.	Range Condition	Score (%)	Efisiensi	Keterangan
1.	<i>Range Red</i>	0-89,99	Tidak Efisien	Kondisi Proyek beresiko karena jauh dari score yang ingin dicapai sehingga perlu adanya tindakan manajemen.
2.	<i>Range Amber</i>	90-99,99	Tidak Efisien	Kondisi proyek mungkin beresiko jika permasalahan yang ada tidak segera ditangani, sehingga memerlukan perhatian khusus.
3.	<i>Range Green</i>	100	Efisien	Kondisi proyek aman terdapat score yang sesuai dengan harapan.

Sumber : Santoso, 2010

## Tingkat Efisiensi BAZNAS tahun 2013-2017

**Tabel 1.3**  
**Hasil Perhitungan Efisiensi DEA BAZNAS Periode 2013 – 2017**

No.	Tahun	<i>Efficiency</i> %	<i>Condition</i>
1.	2013	84,73%	<i>Red</i>
2.	2014	100,00%	<i>Green</i>
3.	2015	75,14%	<i>Red</i>
4.	2016	100,00%	<i>Green</i>
5.	2017	100,00%	<i>Green</i>

*Sumber : data diolah*

**Tabel 1.4**  
**Dana Terhimpun, Dana Tersalurkan,  
Total Biaya dan Perhitungan Rasio BAZNAS Periode 2013 – 2017**

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Dana Terhimpun	Rp69.210.804.676	Rp94.047.882.590	Rp112.055.384.724	Rp142.927.009.265	Rp213.296.280.009
Dana Tersalurkan	Rp45.068.566.496	Rp64.265.141.159	Rp66.766.033.369	Rp67.727.019.807	Rp118.071.046.770
Total Biaya	Rp8.622.560.606	Rp8.673.572.688	Rp11.413.022.487	Rp12.569.771.789	Rp17.691.061.692
Rasio : <u>Total Biaya</u> Dana Terhimpun	0,12	0,09	0,10	0,09	0,08

*Sumber : data diolah*

Pada tabel di atas memperlihatkan hasil pengukuran efisiensi dengan menggunakan *data envelopment analysis* untuk Badan Amil Zakat Nasional pada periode 2013 hingga 2017. Dapat terlihat bahwa tingkat efisiensi yang terjadi pada BAZNAS terjadi sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 2014, 2016 dan 2017. Adapun pada tahun 2013 dan 2015 terjadi inefisiensi pada BAZNAS sebesar 84,73% dan 75,14%.

Penyebab terjadinya inefisiensi pada BAZNAS yang terjadi tahun 2013 disebabkan diantaranya sebagai berikut :

1. Rasio total biaya terhadap dana terhimpun pada tahun 2013 sebesar 0,12 yang mana artinya dari jumlah dana yang terhimpun sebesar Rp69.210.804.676 pada tahun tersebut, terdapat 12% dana yang digunakan oleh pihak amil dalam mendanai kegiatan zakat atau setara dengan Rp8.622.560.606. dari jumlah biaya tersebut, terdapat pengeluaran untuk keperluan operasional seperti Biaya Perjalanan Dinas dan Beban Umum Administrasi yang totalnya mencapai Rp2.033.212.532. nominal ini cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2014 biaya operasional yang digunakan oleh BAZNAS hanya sebesar Rp1.368.064 atau 33% lebih rendah dari tahun sebelumnya.
2. Dengan perolehan persentase biaya yang mendekati ambang batas bagian yang berhak diambil oleh amil tersebut, penyaluran dana zakat yang terjadi pada tahun 2013 hanya sebesar 65%. Sedangkan pada tahun 2014 dengan rasio total biaya terhadap dana terhimpun sebesar 9%, para amil dapat menyalurkan dana zakat sebesar 68% dari dana terhimpun.

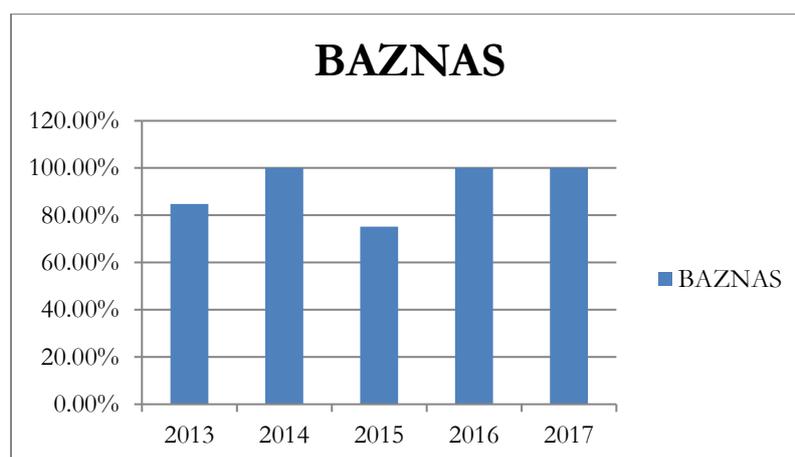
3. Pada tahun 2013, terdapat kenaikan pada belanja pegawai hingga 115%. Dari semula sebesar Rp2.808.333.411 pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp6.030.097.807 pada tahun 2013. Hal ini dapat terjadi dikarenakan penambahan jumlah amil atau peningkatan pada kompensasi yang diberikan seiring dengan upaya Baznas dalam peningkatan kesejahteraan amil.
4. Selanjutnya jika dibandingkan dengan tahun 2012, kenaikan pada biaya perjalanan dinas juga terjadi sebesar 72% dari semula sebesar Rp310.749.622 menjadi sebesar Rp744.636.038. Tak hanya itu, kenaikan juga terjadi pada Biaya Umum dan administrasi sebesar 142% dari yang semula sebesar Rp578.991.668 menjadi Rp1.398.639.627. Kenaikan pada biaya perjalanan dinas saat itu dikarenakan adanya kunjungan BAZNAS pusat ke beberapa kota untuk melakukan koordinasi dengan BAZNAS tingkat provinsi. Sedangkan kenaikan pada Biaya Umum dan Admisitrasi disebabkan oleh pengembangan pada sarana operasional yang membantu amil agar lebih efisien dalam urusan operasional kantor.

Selanjutnya, inefisiensi terjadi pada tahun 2015, dengan presentase efisiensi sebesar 75,14% yang mana penyebabnya adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2015, rasio total biaya terhadap dana terhimpun sebesar 10% yang artinya dari total dana yang terhimpun sebesar Rp112.055.384.724, para pengurus zakat atau pihak amil menggunakan biaya sebesar Rp11.413.022 untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan zakat. Meskipun hasil pada rasio di tahun 2015 tidak sebesar di tahun 2013, namun dapat dilihat bahwa terdapat dua item biaya yang memiliki lonjakan terbesar yakni biaya operasional sebesar Rp3.231.368.402 dan Biaya Sosialisasi sebesar Rp2.679.042.962. Itu artinya peningkatan pada biaya operasionalisasi mencapai 63%.
2. Pada tahun 2015 BAZNAS belum mendapatkan dana hibah dari perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra BAZNAS untuk membantu pelaksanaan dalam kegiatan operasionalnya. Sehingga untuk kegiatan operasionalnya tersebut, pihak BAZNAS sepenuhnya menggunakan bagian dana dari amil yang diambil dari penghimpunan dana zakat, serta sebagian lagi didukung oleh dana APBN sebesar Rp6.000.000.000. Itulah yang menyebabkan terjadinya lonjakan pada biaya pada tahun 2013 yang mana jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tingkat efisiensi BAZNAS sepanjang tahun 2013 hingga 2017 dapat dilihat pada grafik 1.1

**Grafik 1.1**  
**Tingkat Efisiensi BAZNAS Periode 2013 – 2017**



Sumber : data diolah, 2019

Pada periode 2013 hingga 2017 secara keseluruhan kinerja keuangan BAZNAS mengalami perbaikan meskipun sempat mengalami penurunan efisiensi pada tahun 2013 dan 2015. Efisiensi yang terjadi pada tahun 2014, 2016 dan 2017 pada BAZNAS sebesar 100%. Adapun untuk rata-rata pada Rasio Total Biaya terhadap dana yang telah dihimpun amil sebesar 0,1% yang artinya dari rata-rata dana terhimpun sebesar Rp126.307.472.253, pihak pengurus zakat hanya menggunakan 10% dari dana tersebut atau setara dengan Rp11.793.997.852 untuk gaji atau upah amil serta untuk biaya operasional dan sosialisasi. Berdasarkan data rata-rata biaya dari yang terbesar hingga terkecil yang digunakan oleh BAZNAS pada tahun 2013 hingga 2017 yakni biaya personalia sebesar Rp8.465.337.234, selanjutnya adalah biaya operasional sebesar Rp1.835.305.647 lalu yang terakhir adalah biaya sosialisasi sebesar Rp1.493.354.971. Rata-rata rasio dana zakat yang didistribusikan oleh amil sebesar 59% atau Rp72.379.561.520 dari rata-rata terhimpun sebesar Rp126.307.472.253. perolehan ini dapat dikatakan positif meskipun terdapat inefisiensi pada tahun 2013 dan 2015. Kedepannya diharapkan kinerja amil dapat terus meningkat dari tahun ke tahun agar penghimpunan dan pendistribusian dana zakat dapat mengalami peningkatan.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Mayoritas Nilai Efisiensi dari tahun 2013 hingga 2017 pada BAZNAS telah menunjukkan tingkat efisiensi yang optimal yakni 100%. Hanya saja terdapat inefisiensi yang terjadi pada tahun 2013 dan 2015. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi penghimpunan dan penyaluran zakat BAZNAS diantaranya yaitu berbagai program pendistribusian yang tepat guna, kebijakan pemerintah, dan inovasi zakat yang semakin memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakatnya.

### **Saran**

#### **Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengevaluasi kinerja pengelola zakat yang telah mereka bentuk terkait pencapaian dana terhimpun dan penyaluran zakat yang telah dilakukan. Sehingga kedepannya pemerintah dapat menentukan strategi yang tepat dalam mensinergikan kebijakan dalam rangka memperkecil kesenjangan potensi zakat dan penghimpunannya serta masalah pendistribusian yang praktiknya akan dilakukan oleh Badan Pengelola Zakat.

#### **Bagi Badan Pengelola Zakat**

Hasil penelitian ini dapat digunakan pihak manajemen Badan Pengelola Zakat dalam mengevaluasi hasil kinerjanya selama ini dalam hal pengelolaan dana zakat.

#### **Bagi Peneliti Berikutnya**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria pemilihan sample yakni Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah, maka diharapkan penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan sampling dengan memasukkan lembaga zakat yang dibentuk oleh swasta sebagai kriteria dalam pemilihan sampling. Kemudian diharapkan pada penelitian kedepan dapat menambah jumlah variabel input seperti modal yang dimiliki BPZ yang mana jumlah modal yang dimiliki BPZ juga turut mempengaruhi efisiensi penghimpunan dana zakat dan penyalurannya.

## REFERENSI

- Abd Wahab, N., & Rahim, A. (2013). Determinants of Efficiency of Zakat Institutions in Malaysia: A Nonparametric Approach. *Asian Journal of Business and Accounting*.
- Akbar, N. (2009). Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis. *Tazkia Islamic Finance & Business Review*.
- Al-yubi, S., Ascarya, & Possumah, B. T. (2018). Examining the Efficiency of Zakat Management: Indonesian Zakat Institutions Experiences. *International Journal of Zakat Vol.3 (1)*, 37-55.
- Anderson, M. (2001). A new method for non-parametric multivariate analysis of variance. *Austral Ecology*, 32-46.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2017). *Outlook Zakat Indonesia*. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2018). *Outlook Zakat Indonesia*. 2017: BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2018). *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI No. 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat*. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2019). *Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi*. Dipetik April 07, 2019, dari <https://pid.baznas.go.id/badan-amil-zakat-nasional/>
- Badan Pusat Statistik dan Bank Dunia. (2018). *Laporan Statistik Angka Kemiskinan dan Ketidakesetaraan di Berbagai Negara*. Indoensia: BPS.
- Badan Zakat Amil Nasional. (2015). *Laporan Penerimaan Zaakat BAZNAS*. Jakarta: BAZNAS.
- Beik, I., Nursechafia, Muljawan, D., Yumanita, D., Fiona, A., & Nazar, J. (2014). Towards an Establishment of an Efficient and Soakat Supervision. *The Working Group of Zakat Core Principles*, 3-43.
- Creswell, J. (2010). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. London: Sage.
- Departemen Agama RI. (2007). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Firdaus, M. (2012). *Economic estimation and determinations of Zakat potential in Indonesia*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Harto, P. P., Anggraeni, V. S., & Bayinah, A. N. (2018). Komparasi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol 6*, 19-33.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2008). *PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta: IAI.
- Indonesia Magnificience of Zakat. (2011). *Indonesia Zakat and Development Report 2011 : Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*. Ciputat: IMZ.
- Indonesia, P. R. (2001). *KEPRES RI No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Karim, A. (2011). The Significance of Management Information Systems for Enhancing Strategic and Tactical Planning. *Journal of Information System and Technology Management*, 459-470.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods For Business : A Skill Building Approach* . Wiley.

Sukirno. (2015). *Mikroekonomi Teori Pengantar* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widyaningrum, N. (2018). Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional di Indonesia dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol.7*.

## Pengukuran Risiko Operasional dengan Pendekatan BIA dan SA Pada PT. Bank Muamalat

Nur Atiqah<sup>1</sup>, Yulia<sup>2</sup>, Lina Afiyana<sup>3</sup>

<sup>123</sup>IAIN Pontianak

<sup>1</sup>nur\_atiqah@iainptk.ac.id, <sup>2</sup>yuliaibrahim4@gmail.com, <sup>3</sup>linaafiyana07@gmail.com

### ABSTRAK

**Tujuan Penelitian:** Mengukur (1) tingkat risiko operasional dengan pendekatan *Basic Indicator Approach (BIA)* pada PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2018-2022; (2) tingkat risiko operasional dengan pendekatan *Standardized Approach (SA)* pada PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2018-2022.

**Metodologi:** Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif-deskriptif. Sedangkan, untuk menganalisis datanya peneliti menggunakan laporan keuangan yang dianalisis dengan menggunakan *BIA (Basic Indicator Approach)* dan *SA (Standardized Approach)*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yaitu laporan keuangan triwulan PT. Bank Muamalat Indonesia.

**Temuan Penelitian:** Berdasarkan hasil riset dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) pada pendekatan *Basic Indicator Approach (BIA)* menunjukkan bahwa tingkat risiko operasional PT. Bank Muamalat berada di level 1 yaitu di antara 1%-20% yang artinya risiko operasional hampir tidak mungkin terjadi; (2) pada pendekatan *Standardized Approach (SA)* menunjukkan bahwa tingkat risiko operasional Bank Muamalat berada di level 2 yaitu di antara 21%-40% yang artinya risiko operasional kemungkinan kecil terjadinya.

**Kata Kunci:** *Basic Indicator Approach (BIA)*, *Standardized Approach (SA)*, Risiko Operasional

---

### PENDAHULUAN

Peran strategis bank perlu didukung oleh kesehatan kinerja bank. Kesehatan tersebut dapat diketahui dari manajemen risiko bank dan tingkat profitabilitas. Tingkat profitabilitas yang baik menunjukkan tingkat keuntungan bank, sedangkan tingkat risiko bank yang rendah memperlihatkan kemampuan bank dalam mengendalikan risiko. Namun terdapat perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam aktivitasnya. Dalam lingkup perbankan syariah, hubungan antara nasabah dan bank bukanlah hubungan kreditur dan debitur melainkan hubungan kemitraan antara pengelola dana (*mudharib*) dan pemilik dana (*shohibul maal*). Maka dari itu, tingkat keuntungan bank syariah tidak hanya mempengaruhi tingkat hasil untuk para *stakeholder* tetapi juga berpengaruh terhadap hasil yang dapat diberikan kepada nasabah sebagai pemilik dana (Salihin, 2021: 49).

Bank Muamalat adalah bank syariah pertama di Indonesia. Dikutip dari laman CNBC Indonesia, Bank Muamalat sempat mengalami masalah kronis di beberapa tahun terakhir yang berdampak pada penutupan beberapa kantor cabang dan pengurangan karyawan. Namun, jika dilihat kondisi rasio BOPO dan ROA PT. Bank Muamalat saat ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1  
Rasio BOPO dan ROA Bank Muamalat (2018-2021)

Indikator	2018	2019	2020	2021
BOPO	98,24%	99,50%	99,45%	99,29%
ROA	0,08%	0,05%	0,03%	0,02%

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Tahun 2018-2021

Rasio BOPO dan ROA menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola biaya operasional terhadap pendapatan operasional bank. Semakin rendah nilai presentase BOPO, maka suatu bank dapat dikatakan lebih efisien dalam menjalankan kegiatan usahanya. Begitu juga sebaliknya, semakin besar persentase BOPO maka mengindikasikan bahwa bank tersebut dapat dikatakan tidak efisien dalam melaksanakan operasional kegiatannya. Terjadinya peningkatan BOPO dapat menyebabkan penurunan laba, sehingga berdampak pada penurunan ROA (Yusuf, 2017: 145).

Terlihat pada tabel 1, rasio BOPO, PT. Bank Muamalat mengalami fluktuasi selama empat tahun terakhir. Rasio BOPO Bank Muamalat dari tahun 2018 ketahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 1,26%. Kemudian terjadi penurunan selama 2 periode berturut-turut dari tahun 2019 ketahun 2020 turun senilai 0,05% dan dari tahun 2020 ketahun 2021 turun senilai 0,16%, sehingga pada tahun 2021 rasio BOPO mencapai 99,29% dan memiliki nilai rata-rata selama empat tahun yaitu sebesar 99,12%. Hal ini berarti melebihi standar dari Bank Indonesia yaitu sebesar 85%. Bank dengan rasio BOPO yang tinggi menandakan bahwa bank tersebut tidak melaksanakan kegiatan dengan efisien karena tingginya nilai dari rasio ini menunjukkan besarnya jumlah biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh pendapatan operasional (Yusuf, 2017: 144).

Rasio lainnya yaitu ROA, dari tabel 1 menunjukkan bahwa ROA Bank Muamalat mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut. Dari periode 2018 ke periode 2019 turun senilai 0,03%, dari periode 2019 ke periode 2020 turun senilai 0,02% dan dari tahun 2020 ke tahun 2021 turun sebesar 0,01%, sehingga pada tahun 2021 rasio ROA mencapai 0,02% dan memiliki nilai rata-rata dalam 4 tahun yaitu senilai 0,045%. Menurut ketentuan Bank Indonesia batas minimum rasio ROA adalah sebesar 1,5%. Semakin tinggi ROA pada suatu bank maka semakin tinggi tingkat keuntungan yang didapat oleh bank, sehingga besar kemungkinan bank tersebut tidak mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) (Labita & Yudowati, 2020: 1254). Pernyataan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bagus, 2017: 123) bahwa ROA memiliki pengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Dapat dikatakan bahwa dari perbandingan rasio BOPO dan ROA pada Bank Muamalat mungkin terjadi atau potensi kejadian yang akan mengakibatkan terjadinya beberapa risiko, terutama *operational risk*. Risiko merupakan suatu ancaman atau kemungkinan yang dapat menimbulkan dampak yang bertentangan dengan *goal* dari suatu lembaga. Dalam lembaga perbankan risiko yang terjadi sangat beragam, salah satunya risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko akibat kegagalan sistem, ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang berdampak pada operasional perusahaan (Sudarmanto, dkk., 2021: 11). Risiko operasional adalah salah satu risiko yang penting untuk diukur karena risiko ini berhubungan dengan kegiatan operasional dan dapat mempengaruhi pendapatan kotor (*gross income*) bank. Disisi lain, pengukuran tingkat risiko bertujuan untuk melihat kemungkinan risiko operasional yang terjadi, pengukuran risiko operasional ini agar risiko dapat dikendalikan dan diminimalisir dengan baik.

Pengukuran risiko operasional dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu *Basic Indicator Approach*, *Standardized Approach*, dan *Advanced Measurement Approach* (AMA). *Basic Indicator Approach* (BIA) merupakan pendekatan yang memperhitungkan beban modal untuk risiko operasional yang didasarkan pada persentase tertentu dari pendapatan kotor (*gross income*) yang digunakan untuk memperkirakan eksposur risiko bank. *Standardized Approach* (SA) merupakan pendekatan yang membagi kegiatan bank menjadi delapan lini bisnis. Hasil perhitungannya didapatkan dari beban modal dari masing-masing lini bisnis dikali dengan pendapatan kotor (*gross income*) masing-masing lini bisnis dengan suatu konstanta. *Advanced Measurement Approach* (AMA) merupakan pendekatan yang digunakan untuk memperhitungkan kebutuhan modal untuk risiko operasional dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh bank secara internal. Untuk dapat menggunakan pendekatan AMA, bank harus memenuhi kriteria kualitatif dan kuantitatif sebagaimana yang ditetapkan dalam Basel II dan harus mendapatkan persetujuan dari pengawas. Namun pada riset ini hanya akan mengukur tingkat risiko operasional dengan metode perhitungan *Basic Indicator Approach* (BIA) dan *Standardized Approach* (SA) yang digunakan sebagai alat untuk mengukur terjadinya *operational risk*.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Manajemen Risiko Bank Syariah

Risk/risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang akan berdampak pada kerugian jika tidak dikelola dan diantisipasi dengan baik. Risiko di perbankan adalah peristiwa potensial baik yang bisa diprediksi maupun yang tidak bisa diprediksi kemudian menimbulkan dampak buruk pada permodalan dan pendapatan bank (Andrianto dan Firmansyah, 2019: 238). Risiko pada lembaga perbankan tidak bisa dihindarkan, namun bisa dikendalikan dengan menerapkan manajemen risiko.

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang diterapkan untuk mengukur, mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan risiko yang terjadi dari kegiatan operasional bank. Tujuan utama dari implementasi manajemen risiko sendiri adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara konsisten (Jelita dan Shofawati, 2019: 73). Implementasi manajemen risiko dapat memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa mendatang, meningkatkan *shareholder value*, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis didasarkan pada ketersediaan informasi yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing (Darmawan dan Fasa, 2020: 295).

### Risiko Operasional

*Operational Risk* adalah risiko akibat kesalahan manusia, ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian kejadian eksternal yang berdampak pada operasional perusahaan (Sudarmanto, dkk., 2021: 100). *Risk* merupakan kemungkinan akan terjadinya suatu kondisi/peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Salah satu risiko yang sering terjadi dalam lembaga keuangan/perbankan yaitu *operational risk*. Risiko operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan (Sudarmanto, dkk., 2021: 11).

Basel II menyatakan bahwa definisi risiko operasional yaitu risiko kerugian yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat dari kegagalan dan kurang memadainya proses internal karena kurangnya pengetahuan, kelemahan karyawan (kurangnya kompetensi, kurang teliti dalam menjalankan tugasnya) atau terdapat kecurangan yang dilakukan, adanya sistem yang lemah, atau karena kejadian eksternal (Sudarmanto, dkk., 2021: 101).

*Operational Risk* dapat berdampak pada kerugian finansial baik secara langsung maupun tidak langsung, juga berpotensi hilangnya kesempatan dalam mendapatkan keuntungan (Irdawati, dkk., 2021: 70). *Operational risk* juga dapat menimbulkan kerugian yang sulit bahkan tidak dapat atau dihitung dengan pendekatan kuantitatif, seperti reputasi bank yang dampak kerugiannya bisa mengakibatkan kerugian sisi finansial. Misalnya jika reputasi bank menurun maka dapat berakibat nasabah mengalihkan kegiatan perbankannya kepada bank lain. Risiko operasional harus diperhatikan serta dikelola dengan baik, karena dapat menimbulkan masalah keuangan bank (*financial distress*).

Tujuan utama *operational risk management* yaitu untuk meminimalisasi potensi dampak buruk dari kegagalan sistem, kesalahan manusia, tidak berfungsinya proses internal, dan/atau kejadian eksternal. Kemungkinan terjadinya risiko operasional bisa dilihat dengan menggunakan *likelihood risk*. *Likelihood risk* adalah kriteria risiko yang dinyatakan dengan presentase hasil probabilitas keterjadian risiko, dampak tersebut dinyatakan dengan ukuran yang sama dan satuan ukuran sasaran yang terpengaruh dengan skala 1-5.

### **Basic Indicator Approach (BIA) dan Standardized Approach (SA)**

*Basic Indicator Approach* (BIA) adalah pendekatan yang memperhitungkan beban modal untuk risiko operasional yang didasarkan pada persentase tertentu (*alpha factor*) dari pendapatan kotor (*gross income*) yang digunakan untuk memperkirakan eksposur risiko bank (Idroes, 2011: 200). Sedangkan *Standardized Approach* (SA) adalah pendekatan yang melibatkan lini bisnis dan jumlah pendapatan kotor untuk mengukur tingkat risiko yang terjadi. *Standardized Approach* mensyaratkan bank untuk membagi kegiatannya menjadi 8 lini bisnis. Beban modal pada setiap lini bisnis dihitung dengan mengalikan pendapatan kotor setiap lini bisnis dengan suatu konstanta, yaitu faktor lini bisnis (*beta*) yang telah ditetapkan untuk setiap lini bisnis. Secara spesifik pendapatan kotor terkait dengan besarnya bisnis pada suatu lini bisnis memengaruhi tingkat risiko operasional. Delapan lini bisnis yang dimaksud dalam SA meliputi *Trading and Sales, Corporate Finance, Commercial Banking, Retail Banking, Payment and Settlement, Agency Services, Asset Management* dan *Retail Brokerage*.

Pendapatan kotor (*gross income*) diasumsikan sebagai indikator besaran total operasi bisnis untuk perhitungan modal yang harus disisihkan untuk risiko operasional yang dikalikan dengan persentase standar,  $\alpha$  (Lesmana, 2019). Pengukuran risiko operasional ini menggunakan dua pendekatan yaitu *Basic Indicator Approach* (BIA) dan *Standardized Approach* (SA). Kedua pendekatan tersebut menggunakan *gross income* untuk mengukur risiko operasional yang akan terjadi. Sehingga risiko operasional bisa dikendalikan dan jika risiko tersebut terjadi bisa diminimalisir agar tidak terjadi dampak yang serius pada sistem operasional bank.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap fenomena sosial di jabarkan kedalam beberapa komponen masalah, variabel dan indikator. Setiap variabel yang di tentukan di ukur dengan

memberikan simbol-simbol angka yang berbeda-beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variabel tersebut. Dengan menggunakan simbol-simbol angka tersebut, teknik perhitungan secara kuantitatif matematik dapat dilakukan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang belaku umum di dalam suatu parameter (Siyoto & Sodik, 2015: 18). Adapun tujuan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif ini yaitu untuk dapat menjelaskan suatu situasi yang akan diteliti dengan berbagai dukungan studi kepustakaan sehingga dapat lebih memperkuat analisis peneliti dalam menyajikan kesimpulan. Dimana hasil penelitian didapatkan dari perhitungan indikator-indikator terkait variabel penelitian kemudian disajikan secara tertulis oleh peneliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber tidak langsung berasal dari dokumen, ataupun orang lain. Adapun sumber data dokumen dalam riset ini yaitu dari laporan keuangan PT.Bank Muamalat periode 2015-2021. Dari sumber tersebut, dilakukan teknik analisis data menggunakan pendekatan *Basic Indicator Approach* (BIA) dan *Standardized Approach* (SA). Data yang didapatkan dari penelitian yang kemudian dianalisis secara *deskriptive*, kemudian dikumpulkan serta diolah menggunakan rumus yang sesuai dengan variabel penelitian. Kemudian membuat kesimpulan dari hasil analisis pengukuran risiko operasional.

## HASIL DAN DISKUSI

### Tingkat Risiko Operasional Bank Muamalat dengan Pendekatan *BIA* (*Basic Indicator Approach*)

Hasil perhitungan tingkat *operational risk* dengan pendekatan *BIA* (*Basic Indicator Approach*) pada Bank Muamalat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2  
 Hasil Perhitungan dengan Pendekatan *Basic Indicator Approach* (BIA)  
 Tahun 2018-2022

Tahun	Hasil Regulasi Risiko	Level	Profit.	Keterangan
2018	628.584,20	1	5%	Hampir tidak mungkin terjadi
2019	500.818,25	1	5%	Hampir tidak mungkin terjadi
2020	360.167,75	1	5%	Hampir tidak mungkin terjadi
2021	290.365,95	1	5%	Hampir tidak mungkin terjadi

2022	228.331,95	1	5%	Hampir tidak mungkin terjadi
------	------------	---	----	------------------------------

Hasil dari perhitungan BIA pada tabel di atas diperoleh modal regulasi risiko operasional terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari tahun 2018 berjumlah Rp628.584,2 kemudian sampai tahun 2022 turun menjadi Rp228.331,95. Meski terjadinya penurunan secara signifikan selama empat tahun tersebut namun tingkat profitabilitas sebesar 5% yaitu berada di level 1 yang artinya hampir tidak mungkin terjadi risiko operasional pada Bank Muamalat dari tahun 2018 sampai tahun 2022.

Hasil yang didapatkan dari tahun 2018 sampai 2022 menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas sebesar 5% diperoleh dari hasil beban modal dibagi total pendapatan selama tiga tahun berturut-turut dikali 100. Tingkat profitabilitas sebesar 5% menunjukkan bahwa risiko operasional Bank Muamalat berada di level 1 yaitu berada di kriteria kemungkinan 1%-20% yang berarti hampir tidak mungkin terjadi risiko operasional pada Bank Muamalat.

### Tingkat Risiko Operasional Bank Muamalat dengan Pendekatan *Standardized Approach* (SA)

*Standardized Approach* (SA) merupakan pendekatan yang mempersyaratkan bank untuk membagi kegiatannya menjadi delapan lini bisnis. Beban modal pada setiap lini bisnis dihitung dengan mengalikan pendapatan kotor setiap lini bisnis dengan suatu konstanta. Dari delapan lini bisnis yang ada Bank Muamalat masuk kedalam empat lini bisnis yaitu:

Tabel 3  
Hasil Perhitungan Berdasarkan Pendekatan *Standardized Approach* (SA)  
Tahun 2018-2022

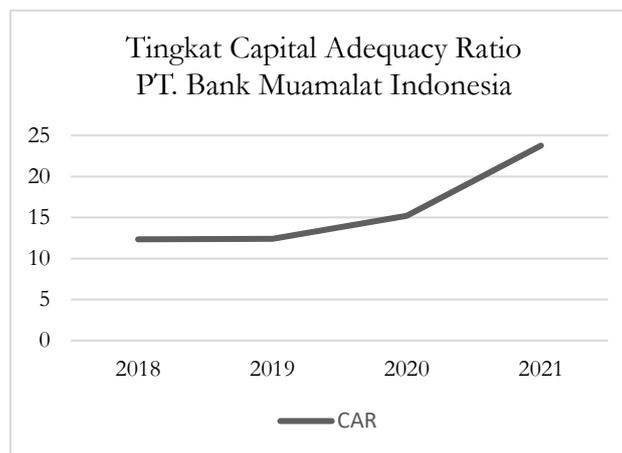
Tahun	Hasil Regulasi Risiko	Level	Profit.	Ket.
2018	2.388.619,96	2,00	33%	Kemungkinan Kecil Terjadi
2019	1.903.109,35	2,00	33%	Kemungkinan Kecil Terjadi
2020	1.368.637,45	2,00	33%	Kemungkinan Kecil Terjadi
2021	1.103.390,61	2,00	33%	Kemungkinan Kecil Terjadi
2022	867.661,41	2,00	33%	Kemungkinan Kecil Terjadi

Hasil dari perhitungan SA pada tabel di atas diperoleh modal regulasi risiko operasional terus mengalami penurunan dari tahun 2018 mencapai Rp 2.388.619,96 sampai tahun 2022 turun menjadi Rp 867.661,41. Meski hasil regulasi risiko operasional terjadi penurunan secara signifikan selama

empat tahun tersebut namun tingkat profitabilitasnya sebesar 33% yaitu berada di level 2 yang artinya risiko operasional kemungkinan kecil terjadi dari tahun 2018-2022.

Hasil yang didapatkan dari tahun 2018 sampai 2022 menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas sebesar 33% diperoleh dari hasil persyaratan pengaturan modal menurut *Standardized Approach* yaitu dibagi dengan total pendapatan selama tiga tahun berturut-turut dikali 100. Tingkat profitabilitas sebesar 33% menunjukkan bahwa risiko operasional Bank Muamalat berada di level 2 yaitu berada di kriteria kemungkinan 21%-40% yang berarti risiko operasional kemungkinan kecil terjadi pada Bank Muamalat. Hal ini dapat disebabkan oleh tingginya modal Bank Muamalat yang dapat dilihat dari rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada grafik sebagai berikut:

Gambar 1



Dilihat dari grafik di atas rasio CAR Bank Muamalat mengalami peningkatan setiap tahunnya hal ini berarti Bank Muamalat masuk dalam kategori sehat dan menggambarkan bahwa beban modal yang dimiliki masih terbilang besar sehingga bisa membuat Bank Muamalat tidak mengalami *financial distress*.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan temuan dan hasil pengukuran, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengukuran risiko operasional dengan pendekatan yaitu *Basic Indicator Approach* (BIA) menunjukkan bahwa tingkat risiko operasional Bank Muamalat berada di level 1 yaitu di antara 1%-20% yang artinya risiko operasional hampir tidak mungkin terjadi. Sedangkan pengukuran risiko operasional dengan pendekatan *Standardized Approach* (SA) menunjukkan bahwa tingkat risiko operasional Bank Muamalat berada di level 2 yaitu di antara 21%-40% yang artinya risiko operasional kemungkinan kecil terjadi. Hasil analisis risiko operasional pada Bank Muamalat menunjukkan bahwa manajemen risiko Bank Muamalat telah beroperasi dengan baik. Pernyataan ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah di paparkan pada bab sebelumnya. Namun Bank Muamalat harus terus menjaga agar risiko operasional tidak terjadi di kemudian hari.

Dengan segala keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dapat mengembangkan pengukuran yang lebih komprehensif untuk mengukur risiko operasional perbankan supaya bisa menjelaskan lebih detail mengenai tingkat risiko operasional dari internal bank. Penelitian sejenis juga bisa dilakukan pada bank-bank umum di Indonesia.

## REFERENSI

- Al Arif, Nur Rianto dan Yuke Rahmawati. 2018. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Andrianto dan M. Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya: Qiara Media
- Bagus, N. M. M. A. I. G. (2017). Rgec sebagai Determinasi dalam Menanggulangi Financial Distress pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Manajemen*, 6(1), 116–145.
- Endra, Febri. 2017. *Pengantar Metodologi Penelitian (Statistika Praktis)*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Fahmy, E. (2020). ANALISA PENGUKURAN BEBAN MODAL RISIKO OPERASIONAL METODE BASIC INDICATOR APPROACH (BIA) DAN ADVANCE MEASUREMENT APPROACH (AMA) DI BANK EFG. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 21(1), 14-20.
- Fadhul dan Hasbi Asyari. 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015. *Cano Economos*. Vol. 7, No. 1.
- Gadzo, S. G., Kportorgbi, H. K., & Gatsi, J. G. (2019). Credit risk and operational risk on financial performance of universal banks in Ghana: A partial least squared structural equation model (PLS SEM) approach. *Cogent Economics & Finance*, 7(1), 1589406
- Hlibko, S., Vnukova, N., Hontar, D., Anisimova, H., & Liubchych, A. (2019). Risk-oriented approach to determining bank's capital size according to requirements of basel committee on banking supervision. *Ikonomicheski Izsledvania*, 56-71.
- Idroes, F. N. (2011). *Manajemen Risiko Perbankan*. PT. Raja Grafindo.
- Irdawati. Mardia. Vina Novela. Edwin Basmar. Astrie Krisnawati. Hengki Mangiring Parulian Simarmata. Arnold Sultantino Hutabarat. Sardjana Orba Manullang. Yessy Kusumadewi. 2021. *Pengantar Manajemen Risiko dan Asuransi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Jelita, Wienanda Rizka Sukma. Atina Shofawati. 2019. *Manajemen Risiko Operasional Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Nur Tebuireng di Surabaya*. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 4, No. 1.
- Labita, M., & Yudowati, S. P. (2020). ANALISIS PENILAIAN KESEHATAN BANK BERBASIS RGEK TERHADAP FINANCIAL DISTRESS (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2018). *Jurnal Mitra Manajemen*, 4(8), 1249–1262. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v4i8.449>
- Lesmana, I. (2017). Risiko Operasional Bank Dan Permodelannya. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 1(1), 28-43.
- Pratikto, Muhammad Iqbal Surya. Ariza Qanita dan Rahma Ulfa Maghfiroh. 2019. Analisis Tingkat Kesehatan dan Potensi Financial Distress Dengan Metode RGEK pada BNI Syariah Tahun 2014-2018. *ElQist*. Vol. 9, No. 1
- Salihin, Agus. 2021. *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*. Bogor: Guepedia.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. In *วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย* (Vol. 4, Issue 1). Literasi Media Publishing.
- Sudarmanto, Eko. Astuti. Iskandar Kato. Edwin Basmar. Hengki Mangiring Parulian Simarmata. Yuniningsih. Irdawati. Nugrahini Susantinah Wisnujati dan Valentine Siagian. 2021. *Manajemen Risiko Perbankan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sunarjo. Sari Yuniarti. 2017. Sistem Pengendalian Risiko Operasional pada Bank Perkreditan Rakyat dengan Pendekatan Indikator Dasar. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 21, No. 1

- Yudiana, Yudi. Didin Hafidhuddin. Rifki Ismail. 2018. Pengukuran Risiko Operasional pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah XYZ). *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*. Vol. 4, No. 2.
- Yusuf, M. (2017). Dampak Indikator Rasio Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 13(2), 141–151.

## Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar dan BI Rate Terhadap Inflasi di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Daya Beli Masyarakat

Silvia Puspita Sari<sup>1</sup>, Syamratun Nurjannah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tanjungpura, <sup>2</sup>IAIN Pontianak

<sup>1</sup>[silviapuspita3@gmail.com](mailto:silviapuspita3@gmail.com), <sup>2</sup>[nurjannah.syamratun@gmail.com](mailto:nurjannah.syamratun@gmail.com)

### ABSTRACT

**This study aims:** to determine and analyze the effect of Exchange Rate, Money Supply, and BI Rate on Inflation and the impact of Inflation itself on People's Purchasing Power.

**This study uses:** a descriptive correlational research design with a case study method and through a quantitative approach. This study uses time series data from 1995 to 2019. The data source is secondary data obtained from Bank Indonesia and Badan Pusat Statistik. Data analysis using path analysis method using SMART PLS 3 program.

**The test results:** show that the Exchange Rate has a significant effect on Inflation with a significance of  $0,000 < 0,05$ . The Money Supply has a significant effect on Inflation with a significance of  $0,000 < 0,05$ . BI Rate has a significant effect on Inflation with a significance  $0,006 < 0,05$ . Inflation has a significant effect on People's Purchasing Power with a significance of  $0,003 < 0,05$ .

### ABSTRAK

**Penelitian ini bertujuan:** untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Nilai Tukar, Uang Beredar, dan BI Rate terhadap Inflasi serta pengaruh Inflasi itu sendiri terhadap Daya Beli Masyarakat.

**Metodologi penelitian ini:** menggunakan rancangan penelitian korelasional dekriptif dengan metode studi kasus dan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 1995-2019. Sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Analisis data menggunakan metode analisis jalur menggunakan program SMART PLS 3.

**Temuan Penelitian:** menunjukkan bahwa Nilai Tukar berpengaruh signifikan terhadap Inflasi dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Jumlah Uang Beredar berpengaruh signifikan terhadap Inflasi dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . BI Rate berpengaruh signifikan terhadap Inflasi dengan signifikansi  $0,006 < 0,05$ . Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Daya Beli Rakyat dengan signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$ .

**Keywords:** *Inflation; Exchange Rate; Money Supply; BI Rate; People's Purchasing Power.*

## PENDAHULUAN

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus menerus dalam suatu periode (Warjiyo, 2007:430). Tingkatan inflasi dapat dibagi menjadi empat kelompok yaitu inflasi rendah, inflasi sedang, inflasi tinggi, dan inflasi yang tidak terkendali (Fadilla, 2017:2). Tingginya tingkat inflasi dan fluktuasi harga berakibat pada memburuknya stabilitas dan kinerja perekonomian. Oleh karena itu, inflasi rendah merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan.

Penyebab inflasi lebih dominan berasal dari desakan biaya dan tarikan permintaan (Nopirin, 2016:28). Desakan biaya berkenaan dengan kenaikan biaya produksi dan menyebabkan kenaikan pada harga *output*, terlebih jika bahan baku impor sehingga nilai tukar sangat menentukan, selanjutnya



dari sisi tarikan permintaan banyaknya jumlah uang beredar di masyarakat akan menaikkan harga barang (Nopirin, 2016:28).

Efek buruk yang dapat ditimbulkan dari inflasi adalah penurunan daya beli masyarakat. Peningkatan inflasi secara terus menerus bisa menggerogoti daya beli masyarakat yang tercermin dari pengurangan pengeluaran konsumsi rumah tangga, sehingga untuk menjaga daya beli masyarakat maka inflasi harus berada pada tingkat yang stabil (Manasseh dkk., 2018:33).

Inflasi sangat identik dengan tingkat harga, jika harga naik maka permintaan akan barang dan jasa akan turun. Artinya, kenaikan inflasi akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan menghambat konsumsi. Nyamekye dan Poku (2017) mengatakan bahwa peningkatan pada inflasi akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan menghambat roda konsumsi.

Nilai tukar mata uang menjadi salah satu variabel makroekonomi yang mempengaruhi perubahan pada inflasi, dikarenakan stabilnya tingkat inflasi dicerminkan melalui kestabilan nilai tukar mata uang (Karahana, 2017:37). Apabila mata uang domestik suatu negara nilainya naik secara relatif terhadap mata uang negara lainnya (apresiasi), maka barang yang dihasilkan oleh negara tersebut di luar negeri menjadi mahal dan barang yang berasal dari luar negeri menjadi murah (asumsi harga dalam negeri kedua negara konstan), namun sebaliknya jika mata uang domestik suatu negara nilainya turun secara relatif terhadap mata uang negara lainnya (depresiasi), maka barang yang dihasilkan oleh negara tersebut akan lebih murah di luar negeri dan harga barang dari luar negeri akan menjadi lebih mahal di negara tersebut (Mishkin, 2009:111 dalam Langi dkk., 2014:48).

Berdasarkan konsep dasar ekonomi, inflasi lebih dominan terjadi ketika masyarakat memegang banyak uang dan tidak diimbangi oleh penawaran barang dan jasa (Mbongo, 2014:19). Pasokan uang yang terus bertambah ini menyebabkan harga barang dan jasa meningkat terutama jika pertumbuhan *output* telah mencapai kapasitas penuh, sehingga dapat disimpulkan bahwa kenaikan pada tingkat harga bukan hanya dikarenakan barang dan jasa lebih langka dari sebelumnya, tapi karena jumlah uang yang melimpah sehingga menurunkan nilai uang itu sendiri (Jumhur, 2018:187).

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi inflasi adalah tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (*BI Rate*), hal ini yang didasari oleh *BI Rate* merupakan faktor fundamental makroekonomi yang mempengaruhi perubahan pada tingkat inflasi secara signifikan di Indonesia (Nurfahana dan Anita, 2017:198). Kebijakan moneter yang saat ini dianut oleh Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilnya tingkat inflasi adalah sebuah kerangka kebijakan yang dinamakan *Inflation Targeting Framework* (ITF). Otoritas moneter akan menaikkan *BI Rate* untuk mempengaruhi suku bunga perbankan yaitu suku bunga tabungan dan kredit.

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Nilai Tukar berpengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia 1995-2019?
2. Apakah Jumlah Uang Beredar berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia 1995-2019?
3. Apakah *BI Rate* berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia 1995-2019?
4. Apakah Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Daya Beli Masyarakat di Indonesia 1995-2019?

## **KERANGKA TEORI**

### **Pengertian Inflasi**

Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum berlaku dalam suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya, sedangkan tingkat inflasi adalah kenaikan harga-harga pada suatu tertentu berbanding dengan sebelumnya (Sukirno, 2015:333).

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2005:279) inflasi adalah peningkatan persentase harga secara umum yang terjadi pada suatu periode tertentu. Inflasi sebagai suatu keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil mata uang suatu negara (Khalwaty, 2001:5)

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa inflasi adalah proses kenaikan harga barang atau jasa dalam suatu perekonomian yang terjadi pada periode tertentu, jika inflasi terjadi secara terus menerus dengan tingkatan yang ekstrim maka akan melemahkan daya beli dan merosotnya nilai riil suatu negara.

Pengukuran inflasi yang digunakan pada penelitian ini adalah inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia.

### **Pengertian Nilai Tukar**

Nilai tukar (kurs) adalah pertukaran antara dua mata uang antara satu negara dengan negara lainnya (Brue, 2005:99). Nilai tukar adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing (Sukirno, 2015:397). Nilai tukar diartikan sebagai harga suatu mata uang relatif terhadap mata uang negara lain (Ekananda, 2014:168). Melihat beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tukar adalah nilai dari satu mata uang domestik yang diartikan ke dalam mata uang negara lain. Saat nilai tukar tinggi maka barang-barang dari luar negeri relatif lebih murah dan barang-barang domestik lebih mahal. Jika nilai tukar rendah maka barang-barang dari luar negeri relatif mahal dan barang-barang domestik relatif lebih murah (Mankiw, 2018:243).

Pengukuran nilai tukar yang biasanya digunakan adalah nilai tukar tungan rupiah terhadap Dollar Amerika.

### **Pengertian Jumlah Uang Beredar**

Uang berarti alat pembayaran atau media pertukaran, penyimpan nilai, dan satuan hitung (Case dkk., 2009:205). Uang berarti sebagai alat pembayaran yang digunakan ketika membeli sesuatu, tetapi lebih dari itu, uang adalah sebuah alat yang memudahkan pertukaran (Samuelson dan Nordhaus, 2005:31). Secara umum pengertian jumlah uang beredar adalah total persediaan uang dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu. Bukan hanya uang yang dipegang oleh masyarakat, melainkan seluruh uang yang dikeluarkan oleh bank sentral.

Jumlah uang beredar diukur menggunakan jumlah uang beredar secara luas (M2) dalam suatu perekonomian.

### **Pengertian BI Rate**

Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dalam persentase dari uang yang biasanya dinyatakan dalam persentase dari uang yang dipinjamkan. Suku bunga adalah harga yang menghubungkan masa kini dan masa depan (Mankiw, 2018:157).

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa suku bunga adalah persentase imbalan dari uang yang telah dipinjamkan atau diinvestasikan untuk dibayarkan di masa depan.

Bank Indonesia mengatakan bahwa suku bunga acuan Bank Indonesia biasa di sebut dengan *BI Rate* adalah sebuah kebijakan suku bunga patokan (*benchmark*) dengan tenor satu bulan yang dikeluarkan dalam mencerminkan kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia sejak 1970 dan diumumkan ke publik. Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur tingkat suku bunga acuan yang akan dipakai dalam perekonomian dalam jangka waktu tertentu. *BI Rate* merupakan suku bunga yang ditetapkan oleh BI sebagai upaya mencapai ekspektasi inflasi. Sebagai suku bunga acuan, *BI Rate* menjadi acuan dalam pergerakan suku bunga di pasar keuangan. Peningkatan ataupun penurunan *BI Rate* diharapkan dapat menstabilkan pergerakan peredaran uang di masyarakat.

### **Pengertian Daya Beli Masyarakat**

Daya beli sebagai kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa pada suatu pasar, pada tingkat pendapatan dan harga dalam suatu periode (Putong, 2003:32). Daya beli berhubungan dengan tingkat pendapatan dan harga yang tercermin sebagai tingkat konsumsi masyarakat. Semakin kecil pendapatan maka semakin rendah daya beli masyarakat karena tingkat konsumsi relatif lebih sedikit. Pengeluaran konsumsi rumah tangga harus mendapat perhatian lebih dalam kajian ekonomi makro karena sebagian besar pendapatan nasional disumbangkan oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Terjadinya inflasi akan menaikkan harga secara umum sehingga menyebabkan penurunan pada konsumsi yang akan terjadi penurunan konsumsi menyebabkan daya beli riil masyarakat menjadi turun (Nur, 2012:72).

### **METODOLOGI**

Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian gabungan antara deksriptif dan korelasional (asosiatif). Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data *time series* 25 tahun yakni dari 1995 sampai 2015 periode triwulan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dan analisis jalur dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) yang dapat mengukur pengaruh antara satu atau beberapa variabel endogen terhadap satu atau beberapa variabel eksogen (Ghozali, 2017:89). Pengambilan sampel berdasarkan jumlah sampel minimal yang telah ditentukan, yaitu minimal jumlah sampel harus 10 kali jalur struktural dan lebih baik jika 20 kali jumlah jalur struktural (Kline, 2016:215). Penelitian ini ada 4 jalur struktural sehingga lebih baik jika menggunakan 80 data. Penelitian ini mengeluarkan data pada 1997 triwulan II hingga 1999 triwulan II dikarenakan tahun tersebut terdapat data dengan nilai ekstrim.

### **Dimensi Operasional Variabel**

Daya beli masyarakat merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uang ke dalam bentuk barang maupun jasa. Daya beli masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga Indonesia. Data dalam variabel ini menggunakan data dalam miliar Rupiah selama periode triwulan dari 1995 – 2019.

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus serta terjadi dalam jangka waktu tertentu. Inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia. Data dalam variabel ini menggunakan data dalam persentase selama periode triwulan dari 1995 sampai 2019.

Nilai tukar adalah harga mata uang suatu negara apabila ditukarkan dengan mata uang negara lain. Nilai tukar yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika (Rp/US\$) selama periode triwulan dari 1995 sampai 2019.

Jumlah uang beredar adalah total uang dalam artian luas (M2) dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu. Jumlah uang beredar yang digunakan dalam penelitian ini adalah M2 di Indonesia. Data dalam variabel ini menggunakan data dalam miliar Rupiah selama periode triwulan dari 1995 sampai 2019.

BI Rate adalah suku bunga patokan yang dikeluarkan dalam rangka mencerminkan kebijakan moneter. Data yang digunakan pada variabel ini adalah data BI Rate selama periode triwulan dari 1995 sampai 2019.

## Hasil dan Pembahasan

### Uji Ketepatan Model

#### 1. *Coefficient of Determinan*

	R Square	R Square Adjusted
Inflasi	0,299	0,275
Daya Beli Masyarakat	0,069	0,059

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi di atas, dapat dilihat bahwa nilai R Square pengaruh secara bersama-sama atau simultan Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar, dan BI Rate terhadap Inflasi adalah sebesar 0,299 dengan nilai Adjusted R Square 0,275. Maka dapat dijelaskan bahwa semua variabel eksogen secara simultan mempengaruhi inflasi sebesar 0,275 atau 27,5% dan sisanya dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Oleh karena nilai Adjusted R Square berada di antara nilai 0,25 dan 0,50 maka pengaruh nilai tukar, jumlah uang beredar, dan BI Rate terhadap inflasi termasuk sedang.

Nilai R Square inflasi terhadap daya beli masyarakat sebesar 0,069 dengan Adjusted R Square 0,059. Maka dapat dijelaskan bahwa inflasi mempengaruhi daya beli masyarakat sebesar 6,9% dan sisanya dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Karena nilai R Square berada di bawah nilai 0,25 maka pengaruh inflasi terhadap daya beli masyarakat termasuk lemah.

#### 2. *Effect Size*

	$f^2$	Keterangan
Nilai Tukar → Inflasi	0,076	0,02 (pengaruh kecil)
JUB → Inflasi	0,074	0,02 (pengaruh kecil)
BI Rate → Inflasi	0,212	0,15–0,35 (pengaruh kuat)
Inflasi → Daya Beli Masyarakat	0,104	0,02-0,15 (pengaruh sedang)

Berdasarkan data di atas, efek kecil dengan kriteria  $f^2 < 0,02$  adalah pengaruh Nilai Tukar terhadap Inflasi dan pengaruh Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi. Sedangkan efek sedang dengan kriteria  $f^2$  antara 0,02 dan 0,15 adalah pengaruh Inflasi terhadap Daya Beli Masyarakat. Untuk pengaruh kuat terdapat pada BI Rate terhadap Inflasi karena kriteria  $f^2$  berada antara 0,15 dan 0,35.

### 3. Model Fit

	<i>Saturated Model</i>	<i>Estimated Model</i>
SRMR	0,000	0,250
d_ULS	0,000	0,938
d_G	0,000	0,217
Chi-square		76,969
NFI	1,000	0,621

Berdasarkan data di atas, model dapat dikatakan *fit* dengan data karena nilai SRMR adalah  $0,000 < 0,08$  dan nilai NFI adalah  $1,000 > 0,90$ .

### 4. Uji Multikolonieritas

	VIF
Nilai Tukar	1,000
JUB	1,000
BI Rate	1,000
Inflasi	1,000
Daya Beli Masyarakat	1,000

Berdasarkan tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolonieritas dikarenakan nilai VIF  $< 5$ . Jika VIF menunjukkan nilai  $> 5$ , maka mengindikasikan terjadinya masalah multikolonieritas yang sangat serius (Hair dkk., 2014:125).

### Uji Hipotesis Pengaruh Langsung

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>	Keputusan
Nilai Tukar → Inflasi	0,376	3,663	0,000	Signifikan, H <sub>0</sub> ditolak
JUB → Inflasi	-0,557	4,953	0,000	Signifikan, H <sub>0</sub> ditolak
BI Rate → Inflasi	0,270	2,748	0,006	Signifikan, H <sub>0</sub> ditolak
Inflasi → Daya Beli Masyarakat	-0,263	2,984	0,003	Signifikan, H <sub>0</sub> ditolak

#### 1. Pengaruh Antara Nilai Tukar Terhadap Inflasi

Nilai tukar berpengaruh positif sebesar 0,376 yang artinya jika nilai tukar mengalami kenaikan 1% maka inflasi mengalami kenaikan sebesar 0,376 satuan, begitu sebaliknya. Sedangkan tingkat signifikansi nilai tukar dan inflasi ditunjukkan dengan probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$  maka H<sub>0</sub> ditolak artinya nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap inflasi.

Nilai tukar berpengaruh positif terhadap inflasi dengan artian jika nilai tukar terdepresiasi maka akan meningkatkan inflasi, begitu sebaliknya. Nilai tukar mata uang domestik mengalami

peningkatan dengan kata lain nilainya turun secara relatif terhadap mata uang lainnya akan menyebabkan kenaikan pada tingkat inflasi.

Depresiasi mengakibatkan masyarakat cenderung untuk membeli banyak barang domestik karena harga barang impor mengalami kenaikan sehingga akan menaikkan permintaan dalam negeri (Ginting, 2016:90). Apabila produksi dalam negeri mengandalkan bahan baku impor maka akan ada kenaikan pada biaya produksi yang berdampak pada besaran *output* dan harga di pasaran.

## 2. Pengaruh Antara Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi

Jumlah uang beredar berpengaruh negatif sebesar 0,557 yang artinya artinya jika jumlah uang beredar mengalami kenaikan 1% maka inflasi mengalami penurunan sebesar 0,557, begitu sebaliknya. Sedangkan tingkat signifikansi nilai tukar dan inflasi ditunjukkan dengan probabilitas sebesar  $0,000 > 0,05$  maka  $H_0$  ditolak artinya jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap inflasi dengan arah negatif. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh Irving Fisher yang mengatakan bahwa perubahan dalam jumlah uang yang beredar berbanding lurus dengan harga. Kenaikan harga yang terus menerus dapat menimbulkan inflasi sesuai dengan teori kuantitas Irving Fisher:  $MV=PT$ , dimana M adalah penawaran uang diasumsikan dalam artian sempit ( $M1$ ) yang mencakup uang kartal dan uang giral, V adalah laju peredaran uang, P adalah tingkat harga dan T adalah jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan (Ginting, 2016:44).

Sedangkan dalam penelitian ini jumlah uang beredar adalah dalam artian luas ( $M2$ ) yang terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Dari ketiga jenis uang yang beredar tersebut persentase uang kuasi yang terdiri dari deposito berjangka, tabungan dan rekening valuta asing milik swasta domestik cukup besar. Uang kuasi tidak memiliki sifat seperti uang kartal dan uang giral yang tingkat likuidasinya tinggi

## 3. Pengaruh Antara BI Rate Terhadap Inflasi

Terdapat pengaruh yang signifikan BI Rate berpengaruh positif sebesar 0,270 artinya jika BI Rate mengalami kenaikan 1% maka inflasi mengalami kenaikan sebesar 0,270 satuan. Sedangkan tingkat signifikansi BI Rate dan inflasi ditunjukkan dengan probabilitas sebesar  $0,006 > 0,05$  maka  $H_0$  ditolak artinya BI Rate berpengaruh signifikan terhadap inflasi. BI Rate berpengaruh signifikan terhadap inflasi dengan arah positif yang mengartikan bahwa perubahan BI Rate terhadap inflasi mengindikasikan perubahan yang berbanding lurus dengan inflasi. Hal ini dikarenakan kenaikan pada BI Rate akan berdampak pada kenaikan pada suku bunga kredit sektor riil. Pengusaha akan merasa terbebani dikarenakan pembiayaan untuk kredit akan bertambah. Untuk menutupi biaya tersebut, maka harga *output* di pasaran akan mengalami kenaikan, dan hal ini bisa memicu terjadinya inflasi. Oleh karena itu penetapan BI Rate sebagai alat pengendali inflasi harus dikaji lebih lanjut. Islam memberikan opsi untuk melakukan sistem bagi hasil, sehingga tidak akan menyebabkan kerugian pada masing-masing pihak seperti halnya jika ditetapkan kebijakan BI Rate.

## 4. Pengaruh Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat

Inflasi berpengaruh negatif sebesar 0,263 yang artinya artinya jika jumlah uang beredar mengalami kenaikan 1% maka daya beli masyarakat mengalami penurunan sebesar 0,263 yang artinya jika inflasi mengalami kenaikan 1% maka daya beli masyarakat mengalami penurunan

sebesar 0,263. Sedangkan tingkat signifikansi inflasi dan daya beli masyarakat ditunjukkan dengan probabilitas sebesar  $0,003 > 0,05$  maka  $H_0$  ditolak artinya inflasi berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori permintaan dalam Sukirno (2015) yang menyatakan bahwa inflasi sangat identik dengan tingkat harga, jika harga naik maka permintaan akan turun. Artinya, kenaikan inflasi akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan menghambat konsumsi. Putong (2013) mengatakan bahwa daya beli masyarakat adalah sebuah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang atau jasa, dengan kata lain jika inflasi terjadi pada level yang tinggi maka akan berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat dikarenakan tingkat harga di pasaran meningkat. Oleh karena itu daya beli masyarakat dapat dilihat melalui tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dilakukan masyarakat.

### Pengaruh Tidak Langsung

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
Nilai Tukar → Daya Beli Masyarakat	-0,099	2,232	0,108
JUB → Daya Beli Masyarakat	0,147	2,398	0,017
BI Rate → Daya Beli Masyarakat	-0,071	1,609	0,026

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Nilai Tukar berpengaruh signifikan positif terhadap inflasi di Indonesia dari 1995-2019 dengan sig.  $0,000 < 0,05$ , hasil ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mishkin dan didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aghisna (2017) namun tidak didukung oleh Arjunita (2016) dan Malau (2017).

Jumlah Uang Beredar berpengaruh signifikan negatif terhadap Inflasi di Indonesia dari 1995-2019 dengan sig.  $0,000 < 0,05$ , hasil ini didukung penelitian sebelumnya oleh Putri (2017) namun tidak didukung oleh Rahmawati (2017) dan Mahendra (2016) serta tidak sesuai dengan teori kuantitas uang.

BI Rate berpengaruh signifikan positif terhadap Inflasi di Indonesia dari 1995-2019 dengan sig.  $0,006 < 0,05$ , hasil ini didukung penelitian sebelumnya oleh Kusuma (2016) namun tidak didukung oleh Fauziyah dan Cahyono (2016) serta tidak sesuai teori yang dikeluarkan Bank Indonesia.

Inflasi berpengaruh signifikan positif terhadap Daya Beli Masyarakat di Indonesia dari 1995-2019 dengan sig.  $0,003 < 0,05$ , hasil ini didukung oleh teori teori permintaan dan didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Nur (2012), namun hasil ini tidak didukung oleh Fitri (2016) , Nyamekye dan Poku (2017).

## REFERENSI

- Brue, Mc Connell. 2005. *Microeconomics, 16<sup>th</sup> Edition*. New York: The McGraw Hill Company.
- Ekananda, Mahyus. 2014. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Fadilla. 2017. *Perbandingan Teori Inflasi Dalam Perspektif Islam dan Konvensional*. Islamic Bankin. Vol 2(2): 1-14.
- Ginting, Ari Mulianta. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi: Studi Kasus Di Indonesia Periode 2004-2014*. Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol 21 (1): 37-58.
- Jumhur. 2018. *Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Ekspor dan Impor Terhadap Inflasi (Studi Empiris Pada Perekonomian Indonesia)*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan. Vol. 7 (3): 186-201.
- Karahan, Ozcan. 2017. *Exchange Rate PassThrough in Turkey Before and After the Adoption of Inflation Targeting Regime*. Journals Muni CZ. Vol. 8 (2): 37-48.
- Khalwaty, T. 2001. *Inflasi dan Solusinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Langi, Theodores Manuela., Vecky Masinambow, dan Hanly Siwu. 2014. *Analisis Pengaruh Suku Bunga BI, Jumlah Uang Beredar, Dan Tingkat Kurs Terhadap Inflasi Di Indonesia*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 14 (2): 44-58.
- Manasseh, Charles O dkk. 2018. *The Effects of Interest and Inflation Rates on Consumption Expenditure: Application of Consumer Spending Model*. International Journal of Economics and Financial Issues. Vol. 8 (4): 32-38.
- Mankiw, N. Gregory. 2018. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mbongo, James Ezekiel. Mutasa, Felician dan Robert Ebihart Msigwa. 2014. *The Effects of Money Supply on Inflation in Tanzania*. Science Publishing Group. Vol 3 (2): 19-26.
- Nopirin. 2016. *Ekonomi Moneter*. (Edisi 1 Cetakan ke-17). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Nur, Ermon Muh. 2012. *Konsumsi dan Inflasi Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi. Vol. 1 (1): 55-72.
- Nurfahana, Anna dan Tri Anita. 2017. *Pengaruh BI Rate dan Nilai Tukar Mengambang Oleh Bank Indonesia Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia 2008-2015*. SOSIO-E-KONS. Vol. 9 (3): 194-199.
- Nyamekye, Gabriel Effah dan Eugene Adusei Poku. 2017. *What is the effect of inflation on consumer spending behaviour in Ghana?*. Munich Personal RePEc Archive. School of Business and Management Studies. Sunyani Technical University.
- Putong, Iskandar. 2013. *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Samuelson & Nordhaus. 2005. *Economics 8<sup>th</sup> Edition*. New York: Mc Graw Hill-Irwin
- Sukirno, Sadono. 2015. *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Cetakan ke- 23. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Warjiyo, Perry Juda Agung. 2007. *Kebijakan Moneter Indonesia*. Seri Kebanksentralan No. 6. PPSK Bank Indonesia. Jakarta.

## Pengaruh Etika Profesi dan *Fee* Audit Terhadap Kualitas Audit

Sabirin<sup>1</sup>, Aulia Azimi<sup>2</sup>, Harry Wahyudi<sup>3</sup>

<sup>123</sup>IAIN Pontianak

<sup>1</sup>sabirin\_bisa@yahoo.com, <sup>2</sup>auliaazimi.iain@gmail.com, <sup>3</sup>harywahyudy1@gmail.com

**Tujuan penelitian ini** adalah untuk mengetahui pengaruh etika profesi auditor dan *fee* audit terhadap kualitas audit.

**Desain / metodologi / pendekatan:** dalam penelitian ini dilakukan analisis statistik deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan alat analisis SPSS 24.

**Temuan Penelitian:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa etika profesi dan *fee* audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

**Kontribusi Teoretis / Orisinalitas:** Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada teknik analisis yang digunakan, selain itu objek penelitian juga berbeda, pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Kantor Akuntan Publik yang berada di Kota Pontianak dan Bandung dan struktur bisnis yang kompleks sehingga menjadikan penelitian layak untuk diteruskan. Berdasarkan permasalahan di atas, dan melihat pentingnya etika profesi serta sangat sensitifnya *fee* audit penulis tertarik untuk meneliti kembali dengan fokus KAP di Pontianak Bandung sebagai responden.

**Keterbatasan dan implikasi penelitian:** Peneliti menyadari keterbatasan dalam penelitian ini yang tentunya memerlukan perbaikan dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah Variabel independen dalam penelitian belum memberikan kontribusi yang baik terhadap variabel dependen. Hal tersebut terlihat dari analisis koefisien determinasi dimana nilai  $R^2$  sebesar 66,6%. Sisanya sebesar 33,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model ini sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel-variabel independen yang secara teoritis dapat berpengaruh lebih besar terhadap kualitas audit. Selain itu data yang dikumpulkan untuk diteliti dan dianalisis berdasarkan pada persepsi masing-masing responden terhadap item-item instrumen penelitian sehingga dapat memungkinkan terjadinya bias atau *miss perception*.

**Kata Kunci:** Etika Profesi, Fee Audit, Kualitas Audit

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Studi

Persaingan dunia bisnis saat ini semakin ketat, sehingga perusahaan publik saling bersaing untuk mengembangkan perusahaannya. Persaingan dunia bisnis ini telah memberikan kesempatan kepada pihak luar untuk berinvestasi dalam bisnis mereka. Untuk menarik calon investor, perusahaan perlu memiliki pelaporan keuangan yang baik. Merujuk peraturan pemerintah dalam pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perseroan tertentu wajib diaudit oleh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Standar Akuntansi (SA 200) dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menjelaskan tujuan audit laporan keuangan untuk memperluas tingkat kepercayaan bagi pengguna laporan keuangan. Hal ini didapat melalui opini auditor mengenai laporan keuangan apakah sudah sesuai dalam semua hal yang material sesuai dengan struktur pelaporan yang relevan.

Proses audit suatu laporan keuangan, auditor independen yang memberikan jasa audit harus mampu menghasilkan audit yang berkualitas, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara manajemen dan pemilik. Kualitas audit dari auditor sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan audit,

karena jika kualitas audit baik, hal ini mengakibatkan laporan hasil audit dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Kualitas audit tergantung pada kapasitas auditor yang berpengalaman dan pendidikan profesional auditor. Sugiarni & Datri (2017) mengkhawatirkan kasus-kasus korupsi yang tidak kunjung selesai, menyebabkan kurangnya keyakinan dari masyarakat atas laporan hasil audit serta profesi auditor. Berikut beberapa kasus perusahaan dan akuntan yang melanggar profesionalisme etika auditor, laporan keuangan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (ATSA) pada periode 2017, sanksi terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Serta akuntan publik Kasner Sirumapea adanya pelanggaran terhadap PT. Garuda Indonesia tahun buku 2018. Berikut beberapa akuntan publik yang disanksi dengan jenis pelanggaran standar profesional di mana akuntan publik tersebut menerima sanksi berupa pembekuan izin pada tahun 2020, diantaranya AP Muhammad berlokasi di Cirebon, AP Henry berlokasi di Yogyakarta, AP Indra berlokasi di Jakarta (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan 2021).

Menurut Trihapsari & Anisykurlillah (2016) etika profesi sebagai kriteria profesi tertentu untuk membedakan suatu profesi dengan profesi lain untuk mengarahkan kegiatan yang dilaksanakan oleh para anggotanya. Indikator etika profesi adalah kepentingan umum (publik), tanggung jawab profesional, integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kerahasiaan, kehati-hatian, perilaku profesional dan standar teknis. Etika profesi merupakan topik diskusi yang menarik bagi masyarakat saat ini. Adanya pelanggaran etika profesi di Indonesia telah membuka mata masyarakat akan perlunya *fee* audit dan sering kali diabaikan di masa lalu. Etika merupakan syarat penting bagi setiap profesi yang ada agar dapat melakukan tindakan yang tidak melanggar hukum. Setiap profesi harus bertindak sesuai dengan moral dan nilai yang berlaku.

Selain etika profesi, hal lain yang dapat mempengaruhi auditor untuk memberikan penilaian audit adalah biaya audit. Nilai *fee* audit untuk setiap pekerjaan audit dilakukan berdasarkan hasil negosiasi. Tidak menutup kemungkinan bahwa ini dapat mempengaruhi kualitas audit.

Hasil penelitian Cahyani & Zulvia (2019) menyebutkan bahwa etika profesi berpengaruh pada kualitas audit. Hasil ini juga serupa dengan hasil penelitian Rahayu & Suryono (2016) bahwa etika profesi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Ini menunjukkan bahwa apabila etika seorang auditor semakin tinggi, maka akan semakin baik pula kualitas auditnya. Kemudian masih dari hasil penelitian Rahayu & Suryono (2016) mengatakan *fee* audit berpengaruh pada kualitas audit. Besarnya biaya audit tergantung pada risiko yang ada saat proses audit berlangsung, kompleksitas jasa, keahlian yang diperlukan untuk melakukan audit, dan struktur biaya dari KAP.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, peneliti merasa perlu melihat masalah yang terkait dengan kualitas audit yang di pengaruhi oleh etika profesi dan *fee* audit. Penelitian ini penting karena adanya pelanggaran etika profesi di Indonesia telah membuka mata masyarakat akan perlunya *fee* audit. Etika merupakan syarat penting bagi setiap profesi yang ada agar dapat melakukan tindakan yang tidak melanggar hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada teknik analisis yang digunakan, selain itu objek penelitian juga berbeda, dan struktur bisnis yang kompleks seperti perusahaan manufaktur, *realestate*, perkebunan sehingga menjadikan penelitian layak untuk diteruskan. Berdasarkan permasalahan di atas, dan melihat pentingnya etika profesi serta sangat sensitifnya *fee* audit, penulis tertarik untuk meneliti kembali persoalan ini dengan fokus KAP di

Pontianak dan Bandung, yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh etika profesi dan *fee* audit terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Kota Pontianak dan Bandung.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh etika profesi auditor dan *fee* audit terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Pontianak dan Bandung. Diketuainya pengaruh etika profesi dan *fee* audit ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan serta peningkatan kualitas audit bagi kantor akuntan publik di Pontianak dan Bandung.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Latar Belakang Teoritis**

*Theory of Reasoned Action* (TRA) diperkenalkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen. Teori tersebut menghubungkan antara keyakinan (*believe*), sikap (*attitude*), kehendak (*intention*) dan perilaku (*behavior*). Kehendak merupakan prediktor terbaik perilaku, artinya: jika ingin mengetahui apa yang akan dilakukan seseorang, cara terbaik adalah mengetahui kehendak orang tersebut (*Fishbein dan Ajzen, 1991*).

Penelitian ini menggunakan *Theory of Reasoned Action* (TRA) karena menurut teori tersebut praktik atau perilaku dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat dipengaruhi oleh sikap, dan norma subjektif dipengaruhi oleh keyakinan atas hasil dari tindakan yang telah lama. Norma subyektif dipengaruhi oleh keyakinan akan pendapat orang lain serta motivasi untuk mentaati pendapat tersebut. Secara lebih sederhana, teori ini mengimplikasikan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan itu positif dan bila ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya.

### **Studi Sebelumnya**

Gusti dan Dwi (2019) menyebutkan etika audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Sama halnya dengan penelitian Mita Pranata Munthe (2018), etika audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Titin Rahayu dan Bambang Suryono (2016) juga menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Dari penjelasan dan penelitian sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa etika profesi berpengaruh terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian Cahyani & Zulvia (2019) etika audit berpengaruh pada kualitas audit. Hasil ini juga serupa pada hasil penelitian Rahayu & Suryono (2016) etika audit memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kualitas audit. Ini menunjukkan bahwa apa bila etika seorang auditor semakin tinggi, maka akan semakin baik pula kualitas auditnya.

Sementara itu, Nurmalia & Saleh (2019) menuturkan bahwa *fee* audit adalah biaya yang diperoleh auditor selepas melakukan audit untuk klien korporasi, besaran *fee* ini berdasarkan dari resiko penugasan selama proses audit, peningkatan pelayanan, tingkat keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan audit dan struktur biaya KAP. Nilai *fee* audit untuk setiap pekerjaan audit dilakukan berdasarkan hasil negosiasi, tidak menutup kemungkinan bahwa ini dapat mempengaruhi kualitas audit.

Penelitian Intan Permata, I Wayan dan Made Putra (2020) menunjukkan *fee* audit secara positif mempengaruhi kualitas audit pada KAP di Bali. Gusti dan Dewi (2019), *fee* audit mempengaruhi kualitas audit. Hasil sama juga disampaikan dalam penelitian Irma Nurmalia dan Ridwan Shaleh (2019) serta Mita Pranata Munthe (2018) menyatakan *fee* auditor secara signifikan berpengaruh pada kualitas audit. Berbeda dengan keempat penelitian di atas, penelitian Darmawanti Baharuddin dan Ikhsan Alwi Ansar (2019) di KAP Makassar menyatakan *fee* audit tidak mempengaruhi kualitas audit.

## **Kerangka Penelitian**

### **Pengaruh Etika Profesi terhadap Kualitas Audit**

Akuntan profesional dalam melaksanakan tugasnya memiliki pedoman seperti kode etik yang berfungsi untuk mengarahkan aktivitas akuntan dalam mengambil keputusan dan dapat mempertanggungjawabkan keputusannya kepada pihak pengguna opini. Menurut Arens (2014) akuntan publik harus mematuhi kode etik profesinya, karena nilai *auditing* atau kualitas audit sangat bergantung pada prinsip-prinsip etika. Kode etik bertujuan untuk membimbing perilaku anggota akuntan dan melindungi pihak yang menggunakan jasa. Auditor harus selalu berpedoman terhadap kode etik ketika melaksanakan audit sehingga kualitas audit dapat selalu terjaga dengan baik. Apabila auditor melanggar salah satu prinsip dari etika profesi maka akan menurunkan kualitas audit yang diberikan, sebagai contoh jika auditor tidak menerapkan prinsip integritas, ketika mendapati temuan tetapi tidak disampaikan karena tidak menerapkan prinsip integritas maka hasil audit bisa dikatakan tidak baik dan menurunkan kualitas audit.

Cahyani dan Zulvia (2019), etika audit memiliki pengaruh positif pada kualitas audit. Sama halnya dengan penelitian Pranata (2018), etika audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Rahayu dan Suryono (2016), juga menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Dari penjelasan dan penelitian sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa etika profesi berpengaruh terhadap kualitas audit.

**H1: Etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit**

### **Pengaruh *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit**

Ketika melakukan audit, auditor berhak menerima *fee* audit atau imbalan jasa dari kliennya baik itu berbentuk uang, barang maupun bentuk lainnya. Biaya audit didasarkan pada alokasi risiko, layanan yang diberikan, kebutuhan untuk memberikan layanan, biaya yang terkait dengan struktur perusahaan audit, dan pertimbangan profesional lainnya. Apabila prosedur audit semakin luas maka semakin tinggi pula biaya auditnya. Tentunya hal ini mempengaruhi kualitas hasil audit, karena dengan demikian hasil audit lebih akurat. Biaya audit yang tinggi akan membuat prosedur audit lebih luas dan lebih rinci sehingga auditor dapat menemukan kemungkinan kesalahan pada laporan keuangan klien. Klien mengharapkan kualitas audit yang baik sesuai dengan tarif yang klien berikan.

Penelitian Sari, Rupa, & Manuaba (2020) menunjukkan *fee* audit secara positif mempengaruhi kualitas audit pada KAP di Bali. Cahyani & Zulvia (2019) mengatakan bahwa *fee* audit mempengaruhi kualitas audit. Hasil yang sama juga disampaikan dalam penelitian Nurmalia & Saleh (2019) serta Pranata et al., (2018) menyatakan *fee* audit secara signifikan berpengaruh pada kualitas audit.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *fee* audit yang dikeluarkan suatu entitas ditentukan oleh luasnya prosedur audit yang dilakukan. Semakin Luas prosedur audit yang akan dilakukan, *fee* audit yang ditetapkan akan semakin tinggi. Sehingga membuat hasil kualitas audit juga semakin baik, karena kemungkinan penyimpangan pada laporan keuangan klien akan terdeteksi akibat dari luasnya prosedur audit yang dilaksanakan.

**H1: *Fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit**

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Variabel**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang didesain untuk mengumpulkan data yang menjelaskan karakteristik orang, kejadian atau situasi. Lebih lanjut bahwa penelitian ini akan mendeskripsikan atau meneliti karakteristik dari sekelompok manusia, objek, kondisi, ataupun

peristiwa pada masa sekarang, yang bisa dilihat secara nyata dan ditunjang dengan pengamatan terhadap: 1) etika profesi, 2) *fee* audit, dan 3) kualitas audit.

Penelitian ini bersifat kausal atau eksplanatori. Penelitian seperti ini menguji apakah satu variabel menyebabkan variabel yang lain berubah atau tidak (Sekaran dan Bougie, 2017). Situasi penelitian ini bersifat tidak diatur atau penelitian korelasional selalu dilakukan dalam situasi tidak diatur sehingga penelitian ini juga dapat dikategorikan pada penelitian studi lapangan. Dengan kata lain, Peneliti hanya mengumpulkan data dan tidak melakukan intervensi apapun yang dapat mempengaruhi hasil (Sekaran dan Bougie, 2017).

Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas atau variabel independen dan variabel terikat atau dependen. Variabel dependen (Y) pada penelitian ini adalah kualitas audit sedangkan variabel independen (X) pada penelitian ini ada dua yaitu, etika profesi ( $X_1$ ) dan *fee* audit ( $X_2$ ). Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal.

Sumber data pada penelitian ini adalah sumber primer. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung (dari tangan pertama) oleh peneliti terkait dengan variabel ketertarikan untuk tujuan tertentu dari studi. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penelitian.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor independen yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Pontianak dan Bandung. KAP di wilayah tersebut berjumlah 34 yang terdiri dari 3 KAP di Pontianak dan 31 KAP di Bandung. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling*. *Convenience sampling* adalah prosedur sampling yang memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai, metode ini digunakan untuk memudahkan peneliti karena metode pemilihan responden sangat bervariasi, karena unsur-unsurnya tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk menentukan sampel.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda. Metode ini akan menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel bebas (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen) (Ghozali, 2018). Sebelum dilakukan pengujian atas hipotesis, terlebih dahulu akan dilakukan pengujian kualitas data dengan uji validitas dan uji reliabilitas serta uji asumsi klasik (meliputi uji multikolinieritas, uji normalitas, dan uji heterogenitas).

### **Pengujian Hipotesis**

#### **1. Koefisien Determinan ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menjelaskan seberapa besar kemampuan model atau interaksi antara etika profesi dan *fee* audit dalam menjelaskan kualitas audit.

#### **2. Uji Statistik F**

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk menguji semua variabel independen yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian variabel ini menggunakan nilai signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Artinya semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

Namun jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Artinya semua variabel independen atau bebas tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi berganda. Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Ghozali, 2018).

Persamaan analisis regresi linier berganda dirumuskan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

### 3. Uji Statistik t

Uji statistik t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Hipotesis alternatif yang hendak diuji adalah:

$H_a$ : Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen

Ada atau tidaknya pengaruh signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui dengan membandingkan nilai signifikannya dengan derajat kepercayaannya. Jika tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 maka  $H_a$  diterima. Demikian pula sebaliknya jika tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 maka  $H_a$  ditolak. Bila  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak berarti ada hubungan signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen besarnya (Ghozali, 2018).

## HASIL DAN DISKUSI

### Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan metode analisis korelasi. Perhitungan dilakukan dengan bantuan program SPSS. Nilai batas korelasi yang digunakan adalah lebih besar dari 0,3 atau signifikansi yang berada di bawah 0,05 menunjukkan sebagai item yang valid (Ghozali, 2018). Hasil pengujian menunjukkan bahwa untuk variabel etika profesi ( $X_1$ ) yang terdiri dari 15 item pernyataan memiliki nilai korelasi di atas 0,3 dan signifikan di bawah 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa item angket variabel etika profesi ( $X_1$ ) valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti.

Variabel *fee* audit ( $X_2$ ) yang terdiri dari 9 item pernyataan memiliki nilai korelasi di atas 0,3 dan signifikansi di bawah 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa item angket variabel *fee* audit ( $X_2$ ) valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Sementara itu variabel kualitas audit ( $Y$ ) yang terdiri dari 10 item pernyataan memiliki nilai korelasi di atas 0,3 dan signifikansi di bawah 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa item angket variabel kualitas audit ( $Y$ ) valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti.

### Hasil Uji Realibilitas

Menurut Ghozali (2018: 46) realibilitas merupakan alat ukur kuesioner yang merupakan indikator suatu variabel. Kuesioner yang reliabel ditandai dengan adanya konsistensi jawaban responden terhadap pertanyaan dari waktu ke waktu. Metode yang digunakan untuk mengukur skala linkert adalah dengan uji reliabilitas yang merupakan lanjutan dari uji validitas, dan butir-butir yang termasuk ke dalam tes adalah yang valid. Untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Alpha Cronbach. Menurut Nunnally (1994) dalam Ghozali (2018:246) suatu kuesioner bisa dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha  $> 0,70$ .

**Tabel 1. Hasil Uji Reabilitas**

Variabel	Alpha	Keterangan
Kualitas audit	0,809	Reliabel
Etika profesi	0,911	Reliabel
Fee audit	0,871	Reliabel

Sumber: SPSS 25, data diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang sudah diperoleh maka hasil perhitungan menunjukkan nilai Cronbach's Alpha masing-masing variabel lebih besar dari 0,700. Dapat diartikan bahwa data yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk reliabel atau dapat dipercaya sehingga dapat dilanjutkan pada analisis berikutnya.

### Hasil Uji Normalitas

Penelitian ini melakukan pengujian asumsi yaitu uji normalitas dengan uji Kolmogorov Smirnov. Menurut Ghozali (2018: 161) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel residual terdistribusi normal dalam model regresi. Adapaun model regresi baik memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. *One sample* Kolmogorov Smirnov merupakan teknik yang dipakai, apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 artinya residual terdistribusi normal. Hasil uji normalitas ditunjukkan di bawah ini.

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas dengan Uji *One Sample* Kolmogorov-Smirnov**

N	42
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.445 <sup>c</sup>

Sumber: SPSS 25, data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig* yang dihasilkan dari *Kolmogorov-Smirnov Test* bernilai sebesar 0,445 yang berarti berada di atas batas maksimum error yaitu 0,05 atau probabilitas  $> 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data di atas memiliki residu berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

### Uji Heterokedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Salah satu uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah Uji Glejser (Ghozali, 2018: 161). Berikut ini disajikan perhitungan yang menunjukkan pengujian heteroskedastisitas:

**Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Heterokedastisitas Melalui Uji Gletser**

Variabel	Sig	Keterangan
X1	0,255	Tidak terjadi Heterokedastisitas
X2	0,791	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Y	0,579	Tidak terjadi Heterokedastisitas

Sumber : SPSS 25, data diolah tahun 2022

Masing-masing variabel berada di atas batas maksimum error yaitu 0,05 atau probabilitas  $> 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas. Hasil ini konsisten dengan uji sebelumnya.

### Hasil Uji Multikolinieritas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dilihat dari hubungan antar variabel bebas yang ditunjukkan oleh angka *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai = 0.10 atau sama dengan nilai VIF = 10. Berikut ini akan disajikan perhitungan yang menunjukkan pengujian multikolinieritas. Pengujian dilakukan dengan bantuan *software SPSS Statistics* diperoleh hasil uji multikolinieritas sebagai berikut:

**Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
X1	0,485	2,061	Tidak terjadi multikolinieritas
X2	0,757	1.321	Tidak terjadi multikolinieritas
Y	0,781	1.280	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : SPSS 25, data diolah tahun 2022

Dari output di atas terlihat bahwa semua variabel independen memiliki *tolerance value* atau nilai toleransi kurang dari 1 dan VIF kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel-variabel independen sehingga data yang diperoleh dapat digunakan dalam penelitian.

### Analisis Koefisien Determinasi

Pengujian dilakukan untuk melihat sejauh mana hubungan variabel terikat kualitas audit dengan variabel bebas yaitu dengan etika profesi dan biaya audit. Ghazali (2018:97) melihat nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat dilihat seberapa baik kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  merupakan kemampuan variabel bebas untuk memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Dalam suatu penelitian sering ingin diketahui seberapa besar hubungan atau pengaruh antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat. Selanjutnya untuk mengetahui besar pengaruh yang diberikan etika profesi (X1), *fee* audit (X2) terhadap kualitas audit (Y) pada Kantor Akuntan Publik Kota Pontianak dan Bandung dapat dilihat dari koefisien determinasi pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5. Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,816	0,666	0,649	2,60104
Predictors : X2, X1, Y				

Sumber : SPSS 25, data diolah tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi atau *Adjusted R<sup>2</sup>* bernilai sebesar 0,666 atau 66,6%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat sebesar 66,6% sedangkan sisanya 33,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi di atas.

### Analisis Uji Simultan (F)

Pengujian secara simultan digunakan untuk mengetahui nilai yang memberikan pengaruh yang kuat atau hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama. Kita dapat menguji secara simultan

apakah model atau persamaan yang telah didapatkan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit. Adapun hasil pengujian secara simultan / uji F statistik dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6. Hasil Uji F Regresi Linear Berganda**

Model	Mean Square	F Hitung	Sig
Regresi	525,769	38,857	0,000
Residual	263,850	-	-
Predictor X2, X1,			

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Dari tabel di atas diperoleh nilai signifikansi F sebesar 0,000 dan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 38,857 sedangkan  $F_{tabel}$  sebesar 4,091. Dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis  $H_0$  ditolak yang berarti pada tingkat signifikansi sebesar 5% terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel etika profesi ( $X_1$ ), dan *fee* audit ( $X_2$ ). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel X dan Y bersama-sama mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

### Hasil Uji Parsial (t)

Hasil pengolahan *software SPSS Statistics* untuk analisis uji parsial disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 7 Hasil Uji Parsial**

Model	B	Standardized Coefficients	t	Sig
Constant	8,980	0	2.360	0,023
X1	0,382	0,600	4,512	0,000
X2	0,220	0,271	2.039	0,048
Variabel Dependent : Y				

Sumber: Data Primer Diolah (2022).

Dengan  $df = 42 - k - 1 = 42 - 2 - 1 = 39$ , maka diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1,685. Dari tabel diketahui untuk variabel etika profesi ( $X_1$ ) memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 4,512 apabila dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  1,685 maka diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel} = 4,512 > 1,685$ . Sementara itu nilai signifikansi etika profesi adalah 0,00 apabila dibandingkan dengan  $\alpha = 5\%$  maka diperoleh  $0,00 < 0,05$ . Dengan demikian  $H_{01}$  ditolak, ini berarti secara parsial etika profesi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Oleh karena itu semakin tinggi etika profesi maka akan semakin tinggi kualitas audit. Sementara koefisien beta etika profesi sebesar 0,382, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh etika profesi sebesar 38,2% terhadap Kualitas audit.

*Fee* audit ( $X_2$ ) diketahui memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2.039 apabila dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  1,685 maka diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel} = 2.039 > 1,685$ . Sementara itu nilai signifikansi *fee* audit ( $X_2$ ) adalah 0,048 apabila dibandingkan dengan  $\alpha = 5\%$  maka diperoleh  $0,048 < 0,05$ . Dengan demikian  $H_{02}$  ditolak, ini berarti secara parsial *fee* audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Oleh karena itu semakin tinggi *fee* audit maka akan semakin tinggi kualitas audit. Sementara koefisien beta *fee* audit sebesar 0,220, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh *fee* audit sebesar 22.0% terhadap kualitas audit.

### **Pengaruh Etika Profesi terhadap Kualitas Audit**

Berdasarkan hasil uji statistik tabel 7 variabel etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, yang artinya semakin tinggi etika profesi maka semakin baik pula kualitas audit. Etika profesi merupakan suatu hal yang harus ditaati oleh seorang auditor, karena ini merupakan pedoman bagi auditor dalam melakukan pekerjaannya. Etika profesi dijadikan sebagai tolok ukur dalam menentukan baik atau tidaknya seseorang dalam menjalankan profesi yang ditekuni.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Reasoned Action (TRA)* yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (1975), bahwa sikap dipengaruhi oleh keyakinan atas hasil dari tindakan yang telah lama. Norma subjektif dipengaruhi oleh keyakinan akan pendapat orang lain serta motivasi untuk mentaati pendapat tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan itu positif dan bila ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya.

Hasil penelitian ini pun relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari, Rupa, & Manuaba (2020) yang menunjukkan *fee* audit secara positif mempengaruhi kualitas audit pada KAP di Bali. Cahyani & Zulvia (2019) mengatakan bahwa *fee* audit mempengaruhi kualitas audit. Hasil sama juga disampaikan dalam penelitian Nurmalia & Saleh (2019) serta Pranata et al., (2018) menyatakan *fee* audit secara signifikan berpengaruh pada kualitas audit.

Merujuk pada penelitian terdahulu, dari hasil uji yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini etika profesi berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Kota Pontianak dan Bandung.

### **Pengaruh Fee Audit terhadap Kualitas Audit**

Berdasarkan hasil uji statistik tabel 7 variabel *fee* audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, yang artinya semakin tinggi *fee* audit maka semakin baik pula kualitas audit. *Fee* audit diukur berdasarkan oleh beberapa hal seperti kompleksitas pekerjaan, struktur KAP, risiko penugasan dan tingkat keahlian. Apabila semakin rumit jenis audit yang diberikan maka semakin tinggi *fee* audit yang ditetapkan.

Hal ini ditegaskan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fachruddin & Handayani (2017) serta Nurmalia & Saleh (2019) seperti telah disinggung sebelumnya. Merujuk pada penelitian tersebut dan dari hasil pengujian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Kota Pontianak dan Bandung.

### **Pengaruh Etika Profesi dan Fee Audit terhadap Kualitas Audit**

Berdasarkan hasil uji statistik variabel etika profesi dan *fee* audit berpengaruh positif serta signifikan terhadap kualitas audit. Auditor yang mempunyai etika profesi tinggi akan menentukan *fee* audit secara benar dan sesuai dengan kebutuhan serta resiko audit, sehingga sangat diperhitungkan dalam audit yang dilakukan dan akan semakin baik dalam menghasilkan audit berkualitas. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa variabel etika profesi dan *fee* audit memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel kualitas audit.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah variabel etika profesi dan *fee* audit secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti semakin baik etika profesi serta dan *fee* audit pegawai akan semakin baik pula kualitas audit.

Hasil penelitian ini berimplikasi pada *Theory of Reasoned Action (TRA)* yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (1975), teori ini mengatakan bahwa sikap dipengaruhi oleh keyakinan atas hasil dari tindakan yang telah lama. Norma subyektif dipengaruhi oleh keyakinan akan pendapat orang lain serta motivasi untuk mentaati pendapat tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang yang akan melakukan sesuatu perbuatan maka ia memandang perbuatan itu positif dan bisa dipercaya, sehingga bagi orang lain akan mengikuti apa yang ia ingin agar orang lain melakukannya.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bukti empiris untuk penelitian di masa yang akan datang dan dapat digunakan sebagai referensi dalam ilmu akuntansi terkait dengan akuntansi keprilakuan, etika profesi, *fee* audit, serta kualitas audit. Penelitian ini juga diharapkan dijadikan sebagai tambahan bahan ajar untuk mata kuliah auditing.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, adapun saran dari peneliti adalah untuk dapat mematuhi etika profesi akuntan publik dengan cara memenuhi setiap unsur yang terdapat di tetapkan oleh asosiasi pada kode etik profesi akuntan publik, selain itu auditor juga dapat mengikuti pendidikan berkelanjutan yang disediakan oleh asosiasi profesi. Dalam menentukan *fee* audit, selain mengacu pada ukuran perusahaan, resiko pekerjaan juga akan lebih baik mengacu pada peraturan yang sudah ditentukan oleh asosiasi, yaitu keputusan IAPI.No.KEP-002/IAPI/VII/2016.

Penelitian di masa yang akan datang bisa memperluas objek penelitian, variabel-variabel yang diteliti seperti perilaku organisasi, iklim organisasi, *personal cost*, dan lain sebagainya yang lebih dapat meningkatkan kualitas audit.

## REFERENSI

- Arens,A.A.RJ.Elder,M.SBeasley.2015.Auditing danJasaAssurance Pendekatan
- Cahyani, G., & Zulvia, D. (2019). Pengaruh Etika Audit Dan *Fee* Audit Terhadap Kualitas Audit Di Kantor Akuntan Publik (Kap) Kota Padang. *Jurnal Pundi*, 3(1), 41–54. <https://doi.org/10.31575/jp.v3i1.127>
- Fachruddin, W., & Handayani, S. (2017). Pengaruh *Fee* Audit, Pengalaman Kerja, Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitasaudit Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 144–155. Retrieved from <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jurnalakundanbisnis/article/view/1234>
- Ghozali,Imam.2018.AplikasiAnalisisMultivariate dengan ProgramIBM SPSS25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro:Semarang.
- Kamil, I., Sukarmanto, E., & Maemunah, M. (2018). Pengaruh Etika Auditor , Pengalaman Auditor dan Audit Fee terhadap Kualitas Audit Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik ( Kap ) di Kota Bandung. *Prosiding Akuntansi*, 783–790.
- Nurmalia, I., & Saleh, R. (2019). Pengaruh independensi auditor dan *fee* auditor terhadap kualitas audit. STIE Muhammadiyah Jakarta. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 122–134.
- Pranata, M., Pengaruh, M., & Audit, E. (2018). *Pengaruh independensi, etika audit dan*.
- Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. (2020). *Infografik laporan periodik pppk*. (September), Arens,A.A.RJ.Elder,M.SBeasley.2015.Auditing danJasaAssurance Pendekatan
- Cahyani, G., & Zulvia, D. (2019). Pengaruh Etika Audit Dan *Fee* Audit Terhadap Kualitas Audit Di Kantor Akuntan Publik (Kap) Kota Padang. *Jurnal Pundi*, 3(1), 41–54. <https://doi.org/10.31575/jp.v3i1.127>
- Fachruddin, W., & Handayani, S. (2017). Pengaruh *Fee* Audit, Pengalaman Kerja, Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitasaudit Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 144–155. Retrieved from <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jurnalakundanbisnis/article/view/1234>
- Ghozali,Imam.2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro:Semarang.
- Kamil, I., Sukarmanto, E., & Maemunah, M. (2018). Pengaruh Etika Auditor , Pengalaman Auditor dan Audit Fee terhadap Kualitas Audit Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik ( Kap ) di Kota Bandung. *Prosiding Akuntansi*, 783–790.
- Nurmalia, I., & Saleh, R. (2019). Pengaruh independensi auditor dan *fee* auditor terhadap kualitas audit. STIE Muhammadiyah Jakarta. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 122–134.
- Pranata, M., Pengaruh, M., & Audit, E. (2018). *Pengaruh independensi, etika audit dan*.
- Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. (2020). *Infografik laporan periodik pppk*. (September), 2020.
- Rahayu, T., & Suryono, B. (2016). Pengaruh Independensi Auditor , Etika Auditor , Dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(April), 1–16.

- Sa'adah, A. R., & Challen, A. E. (2022). Pengaruh Independensi Auditor, *Due Professional Care*, *Fee Audit* Dan Perikatan Audit Terhadap Kualitas Audit . *Jurnal Revenue*, 3(1), 1–9. Retrieved from <https://revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/download/32/66>
- Sari, A. . I. I. P., Rupa, I. W., & Manuaba, I. B. M. P. (2020). Pengaruh *Fee Audit* dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Akuntan Publik di Bali. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 39–44. <https://doi.org/10.22225/jraw.1.1.1545.39-44>
- Sekaran, Uma & Bouge, Roger. 2017. Metode penelitian untuk bisnis. Pendekatan pengembangan keahlian. Penerbit salemba empat, Jakarta.
- Sugiarmini, N. L. A., & Datrini, L. K. (2017). Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi, Kompetensi, Etika, Dan Role Stress Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Bpk Ri Perwakilan Provinsi Bali. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–14. Retrieved from <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna>
- Trihapsari, D. A., & Anisykurlillah, I. (2016). Pengaruh Etika,Independensi,Pengalaman Audit Dan Premature Sign Off Terhadap Kualitas Audit. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–7

## Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Dalam Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar

Verdianti<sup>1</sup>, Puja<sup>2</sup>

<sup>1</sup>IAIN Pontianak

<sup>1</sup>[verdianti@iainptk.ac.id](mailto:verdianti@iainptk.ac.id), <sup>2</sup>[puja36427@gmail.com](mailto:puja36427@gmail.com)

**Tujuan penelitian** ini untuk mengetahui pengaruh Penggunaan digitalisasi terhadap efektivitas dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.

**Desain / metodologi / pendekatan** penelitian kuantitatif, dengan jumlah sampel penelitian 43 responden lembaga BAZNAS Kalbar. Informasi penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS Versi 25.

**Temuan Penelitian** hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara digitalisasi zakat dan efektivitas dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS yang dilihat dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan dan t-statistik bernilai positif (12,122) sedangkan nilai t-tabel 1,681, berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam digitalisasi zakat terhadap tingkat efektivitas dalam pengumpulan zakat BAZNAS berpengaruh terhadap efektivitas karena dari hasil pernyataan yang ada bahwa tingkat pencapaian atau banyaknya hasil kerja yang dicapai telah sesuai dengan tingkat ukuran mutu kerja dengan sesuai tujuan BAZNAS. Melakukan transaksi digitalisasi zakat menggunakan aplikasi LinkAja, dapat dilakukan tanpa batas waktu dalam membayar zakat dan juga dapat dilakukan dengan cepat tanpa adanya hambatan dengan efektif dalam membayar zakat.

**Kata Kunci:** Digitalisasi Zakat, Efektivitas.

### PENDAHULUAN

Di era digitalisasi ini, masyarakat cenderung mengubah gaya dan perilakunya kepada perilaku dan gaya hidup digital pada setiap aktivitas dan transaksi yang dilakukan. Seiring dengan kemajuan teknologi, dunia perzakatan juga mengalami perkembangan. Teknologi digital telah digunakan dalam proses penghimpunan dan penyaluran zakat, pengelolaan zakat, serta sebagai sarana edukasi zakat. Dalam bidang penghimpunan, secara umum terdapat tiga platform yang tersedia untuk menghimpun dana zakat, infak dan sedekah Pertama, internal platform adalah platform yang dikembangkan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sendiri dalam bentuk *website* atau aplikasi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) misalnya, menyediakan laman pembayaran zakat pada situs webnya serta aplikasi Muzakki Corner. Kedua, *external platform*, merupakan platform yang disediakan mitra OPZ untuk menghimpun dana ZIS. Ketiga, *social media platform* yang merupakan platform penghimpunan ZIS melalui media sosial (Jamaludin, N., & Aminah, S. 2021).

Harjun Muharam dan Rizki Pusvitasari (2007: 381) mengatakan efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi, pemanfaatan dan kesesuaian tugas dengan teknologi informasi memberikan pengaruh yang positif jika BAZNAS mampu menerapkan sistem informasi akuntansi dengan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif maka akan mampu menghasilkan informasi yang dapat diterima secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipercaya yang nantinya dapat meningkatkan

efisiensi kinerja. Potensi penghimpunan zakat dapat mencapai 3,4% dari total PDB apabila zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak (Pusat Kajian Strategi, 2019: 6-8). Adapun besaran kemampuan pada tahun 2017 yaitu sebesar 462 triliun rupiah. Nilai kemampuan ini lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan zakat saat ini di mana regulasi yang berlaku adalah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Besarnya kemampuan tersebut pada kenyataannya belum dapat terealisasi secara optimal. Dari tahun 2017, jumlah zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang terkumpul yaitu sebesar 6,2 triliun Pusat Kajian Strategi, 2019: 11). Walaupun mengalami peningkatan sekitar 24% atas dari pengumpulan ZIS pada tahun 2016 yang berjumlah 5 triliun (Pusat Kajian BAZNAS, 2017), tetapi pengumpulan tersebut bahkan masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan potensi penghimpunan zakat (Pusat Kajian Strategi, 2019: 2).

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Pengumpulan Dana Zakat, Infak/Sedekah BAZNAS**  
**Kalimantan Barat 2017-2021**

No .	Tahun	Jumlah Pengumpulan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah
1.	2017	4.029.732.947
2.	2018	3.715.106.301
3.	2019	3.795.405.169
4.	2020	8.763.215.583
5.	2021	4.190.041.456

Sumber: BAZNAS Kalimantan Barat

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah pengumpulan zakat berbeda-beda yang membayar zakat di BAZNAS Kalbar mengalami fluktuasi, yang mana Pada tahun 2017 jumlah dana zakat, infak dan sedekah Terkumpul Rp4.029.732.947, Pada tahun 2018 Jumlah pengumpulan dana zakat menurun sebesar Rp3.715.106.301, Pada tahun 2019 jumlah pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah juga meningkat sedikit dari tahun 2018 sebesar Rp3.795.405.169, Pada tahun 2020 jumlah pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah meningkat lagi dari 2019 sebesar Rp8.763.215.583 dan sedangkan pada tahun 2021 jumlah pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah menurun lagi dari 2020 sebesar Rp4.190.041.456.

Dari jumlah pengumpulan tahun 2017, mayoritas zakat yang dihimpun merupakan zakat maal penghasilan individu, yakni mencapai 44,75% dari total pengumpulan ZIS (BAZNAS, 2018). Sedangkan, proporsi terbesar dari kapasitas pengumpulan zakat adalah zakat perusahaan sebagaimana disebutkan oleh Firdaus, et.al (2012). Dengan begitu, apabila kemampuan ini dapat dioptimalkan, tentunya akan berdampak besar bagi pencapaian penghimpunan zakat nasional. Digitalisasi sistem zakat juga dapat memajukan transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam tata kelola zakat. Melalui para badan dan lembaga zakat, teknologi dinilai mampu memudahkan cara pemasaran hingga pendistribusian dana zakat sehingga lebih tepat guna. Kehadiran teknologi akan mempermudah pembayaran zakat, dan membolehkan mereka untuk memonitor penyaluran dana zakat yang disalurkan. Guna memaksimalkan digitalisasi sistem zakat, (Pusat Kajian Strategi, 2019: 2-3) mengatakan, setidaknya ada tiga area yang perlu dibenahi, meliputi yang pertama peningkatan kesadaran wajib zakat, yang kedua pengumpulan zakat, yang ketiga pelaporan penyaluran zakat.

Ascarya (2018:1) mengatakan alasan bernilainya digitalisasi zakat yang pertama digital *finance* itu bisa mampu membuat pengumpulan atau pengelolaan zakat dilakukan dengan efektif, transparan

dan masif, akhirnya digitalisasi mampu meningkatkan keamanan pengumpulan dan pengelolaan zakat. Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki populasi terbesar keempat di dunia dengan penduduk 255,9 juta orang pada tahun 2015 dan sekitar 85% penduduknya beragama Islam. Sebagai negara muslim terbesar, tidak diragukan lagi Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar.

Tentunya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya atau rendahnya pengumpulan zakat di Indonesia. Menurut (Ascarya dan Yumanita Diana, 2018: 1-2) setidaknya ada tiga penyebab rendahnya penghimpunan dana zakat nasional. Pertama, rendahnya kesadaran muzakki untuk membayar zakat, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat, baik yang publik (BAZNAS) maupun yang privat (LAZ), dan perilaku pembayar zakat yang masih amat karitatif, yaitu berorientasi jangka pendek, desentralistis, dan interpersonal. Kedua, basis zakat yang tergalai masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, seperti zakat fitrah dan zakat profesi. Ketiga, masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat. Namun demikian, sampai saat ini keadaan tersebut belum berubah banyak.

Baznas sebagai badan yang mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana publik wajib menyampaikan transparansi capaian kinerja ke publik. Esensi pengelolaan zakat melalui institusi amil adalah bagaimana mengefektifkan program penyaluran zakat yang memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan mustahik (kelompok penerima zakat). Sejumlah studi membuktikan bahwa penyaluran zakat secara langsung dari muzakki (wajib zakat) kepada mustahik memiliki dampak yang kurang signifikan dibandingkan dengan apabila penyaluran zakat tersebut dilakukan dengan melibatkan peran amil zakat dalam mengintermediasi muzakki dan mustahik.

Namun demikian, harus diakui bahwa kualitas program penyaluran zakat ini perlu untuk terus ditingkatkan. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) perlu untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menyalurkan zakat, baik untuk program yang bersifat konsumtif dan jangka pendek, maupun untuk program-program yang bersifat produktif, memberdayakan, dan memiliki dampak pada jangka panjang (Syauqi, Irfan, 2016). Ketua Badan Amil Zakat Nasional Noor Achmad mengatakan digitalisasi mempermudah umat dan masyarakat untuk menunaikan zakat, terutama saat pandemi Covid-19 karena tanpa berbelit-belit. Ia mengatakan BAZNAS harus menyesuaikan diri dengan era digital sehingga menjadi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang hadir dan dekat dengan umat serta masyarakat. Dengan begitu, BAZNAS menjadi tempat tujuan pertama para pembayar zakat. BAZNAS akan terus memanfaatkan kanal-kanal digital untuk menggandeng para *muzakki*. Optimalisasi jaringan media sosial juga terus ditingkatkan agar menjadi upaya "jemput bola" bagi penerimaan zakat.

Digitalisasi zakat akan sangat memberikan manfaat bagi badan amil maupun bagi calon mustahik. Karena proses pengumpulan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Pengelolaan zakat juga lebih efisien, transparan dan masif. Tidak banyak yang digunakan untuk administrasi, konsumsi, dan biaya marjinal lainnya.

Dengan digitalisasi, pengumpulan zakat akan dapat menjangkau kaum milenial dalam jumlah sangat besar. Selain itu, mobilisasi pembayaran zakat juga dapat diintegrasikan secara profesional. Kepercayaan dan minat masyarakat pembayar zakat (*muzakki*) juga akan meningkat. Dengan demikian, banyaknya jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan melalui aplikasi digital diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik (Basrowi, 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Bab III Pasal 6 dan Pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dua macam yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat. Untuk mengakomodir perkembangan potensi zakat di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur tentang pengelolaan zakat Lembaga amil zakat yaitu lembaga yang membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dengan adanya lembaga amil zakat, maka proses pengumpulan dan penyaluran zakat dapat lebih mudah terarah dan tertib. *Mustahik* dapat merasakan manfaatnya secara adil, distribusinya akan lebih merata tetapi sebaliknya akan terjadi apabila diserahkan secara langsung kepada *muzakki*, walaupun secara hukum Syariah sah-sah saja.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Digitalisasi Zakat

Rustam Aji (2016: 34) mengemukakan bahwa teknologi digital merupakan suatu teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual. Sistem digital yaitu perkembangan dari sistem analog. Digitalisasi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan format yang dapat dibaca oleh komputer. Perubahan sistem analog ke digital telah mengubah banyak hal dan mengancam eksistensi media cetak. Sebagian besar pelanggan media cetak telah beralih ke penggunaan teknologi yang lebih fleksibel, bisa membaca informasi terbaru kapan saja dan dimana saja. Bahwa teori digital selalu berkaitan erat dengan media, karena media terus berkembang seiring dengan majunya teknologi dari media lama sampai media terbaru, sehingga mempermudah manusia dalam segala bidang yang berkaitan dengan teori digital.

Digital yaitu sebuah metode yang kompleks, dan fleksibel yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Sedangkan teori digital yaitu sebuah konsep pemahaman dari perkembangan Zaman mengenai Teknologi dan Sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas. Dan saat ini, di era teknologi digital tengah dimulai. Semua serba teknologi. Peralihan sistem analog ke digital ini, telah mengubah banyak hal (Rustam Aji, 2016: 44).”

Perubahan ini termasuk industri media. Kata media sendiri berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti sebagai perantara sebuah informasi dengan penerima informasi atau media perantara. Media baru secara sederhana adalah media yang terbentuk dari interaksi antara manusia dengan komputer dan internet secara khususnya. Salah satu contohnya sesuatu yang berhubungan dengan komputer dan internet yang di dalamnya ada *social network*, situs-situs web penyedia video dan audio. Bisa juga *handphone* di zaman sekarang ini karena mirip dengan komputer (Rustam Aji, 2016: 44-45).

Kemajuan dan perkembangan teknologi di era globalisasi yang diiringi dengan perkembangan sistem informasi berbasis teknologi terjadi begitu pesat. Hal tersebut telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerapan sistem informasi akuntansi di dalam suatu organisasi (Astuti, Marlita, Puja dan Dharmadiaksa, Ida, Bagus, 2014: 373).

Sistem informasi akuntansi dianggap sebagai faktor penting dalam pencapaian kinerja yang lebih besar terutama dalam proses pengambilan keputusan (Al-Eqab and Adel, 2013). Sistem informasi akuntansi dapat dikatakan efektif jika sistem mampu menghasilkan informasi yang dapat diterima dan mampu memenuhi harapan informasi secara tepat waktu (*timely*), akurat (*accurate*), dan dapat dipercaya (*reliable*) (Widjajanto, 2001) dalam (Astuti, Marlita, Puja dan Dharmadiaksa, Ida, Bagus, 2014: 374).”

“Thompson et al, (1991) dalam Astuti, Marlita, Puja dan Dharmadiaksa, Ida, Bagus (2014: 376) memberikan definisi pemanfaatan dari teknologi merupakan manfaat yang diharapkan oleh individu yang menggunakan teknologi dalam melaksanakan tugas. Jurnal (2002) berpendapat bahwa pemanfaatan teknologi sangat berhubungan dengan perilaku individu dalam menggunakan teknologi tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk diperhatikan agar mampu menghasilkan keputusan yang lebih efektif dan informatif”

Muzakki dkk, (2016) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengendalian data dan penghasil data. Adanya suatu sistem informasi berbasis teknologi mengacu pada tujuan sistem informasi itu sendiri, keunggulan utama dari sistem informasi

berbasis teknologi adalah sifatnya yang online dan *realtime* laporan dapat dihasilkan langsung dari basis data transaksi sehingga mencerminkan kondisi terkini dari operasional bisnis. Semua transaksi yang tercatat bisa dalam bentuk *softcopy* atau *hardcopy*, sehingga dapat ditelusuri dengan mudah (Muzakki dkk, 2016: 171).

Harahap, Dwi, Berlian (2017: 41) mengemukakan bahwa dimensi tentang teknologi informasi ada 2 (dua), yaitu:

- a. Kemudahan merupakan dapat melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Transaksi keuangan dapat dilakukan hanya dengan hitungan menit.
- b. Risiko tidak selalu sesuatu hal yang buruk. Kenyataan risiko bisa mengandung di dalamnya suatu peluang yang sangat besar bagi yang mengelolanya dengan baik. Kepercayaan merupakan kepercayaan pengguna teknologi informasi dalam memutuskan penerimaan teknologi informasi dengan satu kepercayaan bahwa pengguna teknologi informasi tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi penggunanya.

## **EFEKTIVITAS**

Menurut Hasibuan (2019:120) “Efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan-tujuan dari suatu instansi yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam efektivitas terkandung makna berdaya tepat atau berhasil guna untuk menyebutkan bahwa sesuatu itu telah berhasil dilaksanakan secara sempurna, secara tepat dan target telah tercapai. Selain itu guna untuk menunjukkan bila suatu tindakan atau usaha sudah efektif dan ekonomis, baru dikatakan efektif”.

Efektivitas merupakan ukuran suatu organisasi dalam mencapai proses kerja yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas. Berbagai literatur konsep yang membahas efektivitas kinerja menunjukkan hasil yang dicapai dalam arti bahwa efektifitas kerja adalah suatu kegiatan yang diukur besar kecilnya penyesuaian antara tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam kerja dengan hasil yang baik. Jelasnya jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai sumber dengan yang telah direncanakan sebelumnya dapat disebut efektif (Shofiana Syam, 2020: 130).

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Shofiana Syam, 2020: 134).

Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut H Hermawan (2017:156) yang meliputi :

- 1) Kemampuan Menyesuaikan Diri
- 2) Prestasi Kerja
- 3) Kepuasan Kerja
- 4) Kualitas
- 5) Penilaian Oleh Pihak Luar

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif deskriptif dengan jumlah populasi 43 (empat puluh tiga) orang karyawan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini diperoleh angka-angka yang harus dianalisis. Penelitian deskriptif ini berdasarkan karakteristik dari masalah penelitian merupakan penelitian terhadap masalah yang terjadi saat ini dari suatu populasi. Jenis informasi atau data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Peneliti menggunakan metode penyebaran kuesioner dalam pengumpulan data primer. Data yang diolah dari pengisian kuesioner yang diisi langsung oleh responden. Responden penelitian ini adalah seluruh karyawan dan muzzaki di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat yang bersangkutan dengan pengumpulan zakat. sampel yang digunakan sampel non probabilitas menggunakan uji instrumen, uji asumsi klasik dan pegujian hipotesis menggunakan SPSS Versi 25.

## HASIL DAN DISKUSI

### Uji Validitas dan Reliabilitas

#### 1. Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Digitalisasi Zakat

Item	Koefisien Korelasi (r)	Signifikansi	Keterangan
X.1	0,812	0,000	Valid
X.2	0,650	0,000	Valid
X.3	0,800	0,000	Valid
X.4	0,840	0,000	Valid
X.5	0,821	0,000	Valid
X.6	0,795	0,000	Valid
X.7	0,843	0,000	Valid
X.8	0,852	0,000	Valid

Berdasarkan Tabel 2 hasil uji validitas variabel Digitalisasi Zakat (X) dapat diketahui bahwa semua item pernyataan memiliki nilai signifikan  $< 0,05$  sehingga item X.1 – X.8 dinyatakan valid, sehingga alat ukur yang digunakan sudah dapat mengukur apa yang seharusnya diteliti. Karena variabel Digitalisasi Zakat (X) valid, maka penelitian ini dapat dilanjutkan.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Efektivitas

Item	Koefisien Korelasi (r)	Signifikansi	Keterangan
Y.1	0,789	0,000	Valid
Y.2	0,785	0,000	Valid
Y.3	0,793	0,000	Valid
Y.4	0,844	0,000	Valid
Y.5	0,871	0,000	Valid
Y.6	0,809	0,000	Valid
Y.7	0,714	0,000	Valid
Y.8	0,747	0,000	Valid

Berdasarkan Tabel 3 hasil uji validitas variabel Efektivitas (Y) dapat diketahui bahwa semua item pernyataan memiliki nilai signifikan  $< 0,05$  sehingga item Y.1 – Y.8 dinyatakan valid, sehingga alat ukur yang digunakan sudah dapat mengukur apa yang seharusnya diteliti. Karena variabel Efektivitas (Y) valid, maka penelitian ini dapat dilanjutkan.

## 2. Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas (X,Y)

Item	<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Item	Keterangan
X	0,921	8	Reliabel
Y	0,916	8	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrument dengan menggunakan aplikasi statistik IBM SPSS Versi 25 pada tabel 4 di atas, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,301$  pada semua variabel yaitu X dan Y sehingga kedua variabel tersebut sudah dikatakan reliabel, artinya analisis dapat dilanjutkan.

## Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

N	Test Statistic	Asymp. Sig. (2-tailed)
43	.085	.200 <sup>c,d</sup>

Hasil uji Kolmogorov Smirnov di atas menunjukkan nilainya sebesar 0,200 dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. Hal tersebut berarti membuktikan bahwa data residual telah terdistribusi dengan normal, karena telah memenuhi syarat yaitu nilai signifikansi harus lebih dari 0,05. Oleh karena itu, hasil uji ini telah konsisten dengan uji sebelumnya.

## Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Hasil Uji *Heteroskedastisitas*

Model	Unstandardized Coefficients		
	B	T	Sig
(Constant)	2.292	1.1352	.184
Digitalisasi Zakat	-.025	-.516	.609

Pada tabel 6 uji *Heteroskedastisitas* di atas, nilai signifikan yang diperoleh dari uji tersebut adalah sebesar 0,609 untuk variabel digitalisasi zakat. Nilai yang diperoleh variabel telah memenuhi syarat statistik bahwa nilai signifikansi dalam uji ini di atas 0,05, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

## Uji Regresi Linear Sederhana

Tabel 7 Hasil Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
Constant)	4.048	2.565		1.578	.122
Digitalisasi Zakat	.880	.073	.884	12.122	.000

Dari tabel 7 hasil analisis regresi linear sederhana di atas, diperoleh koefisien variabel efektivitas (Y) sebesar 0,880. Oleh karena itu, persamaan regresi yang diperoleh adalah

$$Y = a + BX$$

$$Y = 4,048 + 0,880X$$

Dengan

Y = Efektivitas

a = konstanta

b = koefisien variabel digitalisasi zakat

X = Digitalisasi Zakat.

Sehingga dapat diartikan konstanta sebesar 4,408 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 4,408. Koefisien regresi X sebesar 0,880 menyatakan bahwa penambahan 1% digitalisasi, maka nilai partisipasi bertambah 4,408. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi penggunaan digitalisasi zakat maka akan semakin efektif juga pengumpulan zakat di BAZNAS.

## Uji Hipotesis

### 1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 8 Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.884 <sup>a</sup>	.782	.777	1.94748

Berdasarkan Tabel 8 output SPSS di atas, besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,777 atau sebesar 77,7 %. Hal tersebut berarti variabel efektivitas dapat dijelaskan oleh variabel digitalisasi zakat yaitu sebesar 77,7 %. Sedangkan sisanya yang sebanyak 22,3 % ( $100\% - 77,7\% = 22,3\%$ ) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model atau di luar variabel dalam penelitian ini.

### 2. Uji T

Tabel 10 Hasil Uji T

Model	B	T	Sig
(Constant)	4.048	1.578	.122
Digitalisasi Zakat	.880	12.122	,000

Berdasarkan pada tabel 10 di atas diperoleh nilai t hitung (t-test) untuk variabel digitalisasi zakat (X) terhadap variabel efektivitas (Y) bahwa nilai  $T_{hitung}$  sebesar 12,122 dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  sedangkan nilai  $T_{tabel}$  1,681 hal ini berarti nilai  $T_{hitung} > T_{tabel}$  dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak, artinya terdapat pengaruh secara individu (parsial) antara digitalisasi zakat (X) terhadap efektivitas (Y).

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh penggunaan digitalisasi zakat terhadap efektivitas dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS Kalbar**

Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan regresi linear sederhana dengan melihat nilai Berdasarkan hasil pengolahan data tentang pengaruh digitalisasi zakat terhadap efektivitas pada BAZNAS diperoleh nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  yang dengan demikian bahwa  $H_1$  diterima, artinya terdapat pengaruh positif secara individu (parsial) antara digitalisasi zakat terhadap efektivitas dan pengaruhnya sebesar 0,884 dan t-statistik bernilai positif (12,122).

Dalam penelitian ini Digitalisasi zakat menggunakan aplikasi LinkAja, Transaksi zakat dengan menggunakan LinkAja dapat dilakukan kapan saja tanpa batas waktu dalam membayar zakat dan juga dapat dilakukan dengan cepat. Link aja merupakan perangkat sistem internal BAZNAS yang memfasilitasi semua kegiatan BAZNAS, salah satunya mengolah, menyimpan dan membayar zakat. Pendistribusian zakat yang efektif dan tepat dapat dikatakan bahwa kemampuan bekerja demi mencapai hasil yang optimal pada BAZNAS sudah efektif. Semakin efektif lembaga dalam melakukan penghimpunan, maka semakin baik pula tata kelola.

Penelitian ini selaras dengan penelitian (Siti Nur Azizah, 2018) ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula adanya kinerja organisasi zakat tersebut. Hal ini menunjukkan digitalisasi zakat terhadap efektivitas mempengaruhi kinerja BAZNAS. Organisasi zakat bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, di antaranya mampu memberikan pengaruh atau dapat membawa hasil. Penilaian efektivitas penyaluran zakat bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana zakat yang dikelola Baznas telah memenuhi standar kriteria efektif sesuai dengan acuannya sehingga pengelolaannya dapat di pertanggungjawabkan (Bahri & Khumaini, (2020:169).

Partisipasi masyarakat juga merupakan hal yang penting dilakukan, mengingat tujuan dari adanya efektifnya kinerja BAZNAS untuk mensejahterakan masyarakat, efektivitas dalam pengumpulan zakat BAZNAS berpengaruh terhadap efektivitas karena dari hasil penelitian yang ada bahwa tingkat pencapaian atau banyaknya hasil kerja yang dicapai telah sesuai dengan tingkat ukuran mutu kerja dengan sesuai tujuan BAZNAS. Untuk melakukan transaksi digitalisasi zakat mempermudah muzakki menggunakan aplikasi LinkAja, dapat dilakukan tanpa batas waktu dalam membayar zakat dan juga dapat dilakukan dengan cepat tanpa adanya hambatan dengan efektif dalam membayar zakat. Sehingga, partisipasi masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mempersiapkan masyarakat agar lebih mandiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi digitalisasi zakat berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas kemampuan bekerja demi mencapai hasil yang optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya jawaban setuju dalam kuesioner.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan digitalisasi zakat terhadap efektivitas dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS yang dilihat dengan hasil pengujian regresi dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan t-statistik bernilai positif (12,122). Peran dalam digitalisasi zakat terhadap tingkat efektivitas dalam pengumpulan zakat BAZNAS berpengaruh terhadap efektivitas karena dari hasil pernyataan yang ada bahwa tingkat pencapaian atau banyaknya hasil kerja yang dicapai telah sesuai dengan tingkat kerja dan tujuan BAZNAS.

## REFERENSI

- Ascarya dan Diana Yumanita. 2018. Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Indonesia dan Alternatif Solusinya
- Azizah, S. N. (2018). Efektivitas kinerja keuangan badan amil zakat nasional (BAZNAS) pada program pentasharufan dana zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 91-112.
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164-175.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Firdaus, M., Beik, I., & Irawan, T. (2012). Economic and Determinations of Zakat Potential in Indonesia. Islamic Research and Training Institute, -.
- Harjum Muharam & Pusvitasari, 2007. Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah di Indonesia
- Hasibuan, Malayu. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hermawan, H. (2017). Pengembangan Destinasi Wisata pada Tingkat Tapak Lahan dengan Pendekatan Analisis SWOT. *Jurnal Parivisata*, 4(2), 64-74.
- Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 180-208.
- Muzakki, M. H., Susilo, H., & Yuniarto, S. R. (2016). Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan PT. TELKOM Pusat Divisi Regional V Surabaya). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 39(2), 169-175.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. 2018. Outlook Zakat Indonesia: Jakarta Pusat
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. 2019. Outlook Zakat Indonesia: Jakarta Pusat
- Rustam Aji. 2016. Digitalisasi, Era Tantangan Media. *Islamic Communication Journal*, 01(01), 44-45.
- Syam, S. (2020). Pengaruh Efektifitas dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(2), 128-152.

**Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Perspektif  
*Al-Muraqabah* pada Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir  
Kabupaten Kayong Utara 2020**

**Pratiwi Kurniati<sup>1</sup>, Devi Apriani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>IAIN Pontianak

Email: [kurniatipratiwi2105@gmail.com](mailto:kurniatipratiwi2105@gmail.com), [dapriani881@gmail.com](mailto:dapriani881@gmail.com)

**ABSTARCT**

**This study aims to:** find out how far the implementation of accountability is carried out by the government of the village of Nipah Kuning, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara district in managing village fund allocations.

**This study used qualitative methods:** with data collection techniques in the form of open interviews which were then followed by testing the validity of the data using source triangulation techniques.

**The result of:** the study shows that all stages of village fund allocation management are accountable. The village government has implemented well regarding the accountability of its ADD based on the *al muraqabah* concept, but at the supervision stage it is still not effective. Even so the village government has tried its best for the progress of its village.

**Keywords:** *Accountability, Management Of Village Fund Allocation, Muraqabah Concept.*

**ABSTRAK**

**Penelitian ini bertujuan:** untuk mengetahui seberapa jauh penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintahan desa Nipah Kuning, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara pada pengelolaan Alokasi Dana Desa.

**Metodologi:** penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa wawancara terbuka yang kemudian dilanjutkan dengan uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

**Temuan:** penelitian menunjukkan bahwa seluruh tahap pengelolaan alokasi dana desa nya sudah akuntabel.

Pemerintah desa sudah menerapkan dengan baik terkait akuntabilitas dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari ADD nya berdasarkan konsep *al-muraqabah*, tetapi pada tahapan pengawasannya masih belum efektif. Walaupun begitu pemerintah desa sudah berusaha sebaik mungkin memberikan yang terbaik untuk desa.

**Kata Kunci :** *Akuntabilitas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Konsep Muraqabah*

**PENDAHULUAN**

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, wewenang untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa ideal yang dicita-citakan adalah desa kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita yang dimaksudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat desa adalah mewujudkan masyarakat sebagai subyek pembangunan

dan desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan serta aset desa (Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014).

Undang-undang desa menyebutkan bahwa desa yang dimaksud adalah desa yang berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota. Pengaturan tentang kedudukan desa ini sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah desa itu sendiri. Meski demikian desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat desa memilih kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa berkewajiban untuk memimpin desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintahan desa.

BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi kepala desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta urusan masyarakat. Hal-hal strategis di desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa, BPD dan masyarakat desa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah desa nantinya wajib di pedomani oleh kepala desa dalam merumuskan berbagai kebijakan desa termasuk kebijakan pembangunan desa.

Tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan (PerBup Nomor 4 Tahun 2021).

Pemerintahan mengeluarkan kebijakan bantuan untuk desa yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang kemudian ADD tersebut akan disalurkan kepada desa berupa dana transfer yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (Aryanti dan Andini, 2021:2). Alokasi dana desa bisa dikatakan sebagai bentuk bantuan stimulan atau dana perangsang sebagai pendorong program penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Permendes No. 5 Tahun 2015).

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 yang menyebutkan tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam beberapa situasi, penggunaan dana desa ini sangat rawan terhadap penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, dimana seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang tapi pada kenyataannya bertolak belakang. Besarnya jumlah ADD yang diberikan kepada desa bahkan memunculkan pertanyaan skeptis apakah desa beserta elemen yang ada mampu melaksanakan kewajiban sebagai pemerintah secara baik dan jujur (Siregar dkk., 2020:399).

Berkenaan dengan hal itu, *al-muraqabah* dalam terminologi Islam mempunyai tujuan untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta dari sifat tamak. Jika *al-muraqabah* ini dihubungkan dengan ADD, konsep *al-muraqabah* dimaksudkan untuk memelihara agama Islam sebagai agama yang paripurna, memelihara jiwa dari sifat tamak, dan memelihara akal agar senantiasa dapat berfikir secara tepat. Konseptualisasi ini juga bertujuan agar pemberdayaan desa dilakukan secara ikhlas, semata-mata demi mencapai kemaslahatan umat di bawah naungan Allah Swt.

Dengan demikian, ADD yang dimaksudkan dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuan asalnya yakni meningkatkan pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, serta berusaha mengefektifkan pengelolaan sumber daya alam secara sistematis sesuai dengan tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kesejahteraan yang dimaksudkan adalah berlandaskan nilai-nilai keimanan dalam wujud konsep *al-muraqabah* (Irfan dkk., 2021:110).

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kayong Utara karena didasarkan pada luas wilayahnya yang relatif kecil jika dibandingkan wilayah kabupaten atau kota lain di Kalimantan Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pun masih terbilang rendah dibandingkan dengan

kabupaten atau kota lainnya. Selain itu, Kabupaten Kayong Utara tidak jarang dilanda bencana alam seperti banjir maupun longsor akibat curah hujan yang tinggi. Hal itu menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Wujud nyata Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mendorong pemerintah desa agar berpartisipasi dalam pembangunan desa adalah dengan cara meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) itu sendiri. Dari tahun ke tahun jumlah ADD di Kabupaten Kayong Utara selalu mengalami kenaikan. Sebagai contoh, pada tahun 2020 jumlah ADD Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp 50.728.212.300 yang dibagi kepada 43 desa di enam Kecamatan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Alokasi Dana Desa**  
**di Tiap Kecamatan Simpang Hilir**  
**Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020**

No	Kecamatan/ Desa	Alokasi Dana Desa Setiap Desa
<b>Sukadana</b>		
1.	Sutera	Rp1.152.984.400
2.	Pangkalan Buton	Rp1.148.344.200
3.	Sejahtera	Rp1.163.645.200
4.	Simpang Tiga	Rp1.150.726.200
5.	Benawai Agung	Rp1.152.905.000
6.	Harapan Mulia	Rp1.168.986.000
7.	Pampang Harapan	Rp1.146.189.200
8.	Sedahan Jaya	Rp1.157.149.100
9.	Gunung Sembilan	Rp1.169.547.800
10.	Riam Berasap Jaya	Rp1.152.147.900
	<b>Jumlah</b>	Rp11.562.625.000
<b>Simpang Hilir</b>		
1.	Teluk Melano	Rp1.144.744.400
2.	Nipah Kuning	Rp1.177.062.600
3.	Pemangkat	Rp1.152.301.600
4.	Padu Banjar	Rp1.204.634.400
5.	Penjalaan	Rp1.253.820.600
6.	Sungai Mata-Mata	Rp1.304.246.000
7.	Batu Barat	Rp1.233.909.700
8.	Pulau Kumbang	Rp1.139.437.900
9.	Rantau Panjang	Rp1.165.488.600
10.	Matan Jaya	Rp 1.254.892.700
11.	Medan jaya	Rp1.152.905.600
12.	Lubuk Batu	Rp1.147.461.000
	<b>Jumlah</b>	Rp14.330.905.100
<b>Teluk Batang</b>		
1.	Mas Bangun	Rp1.251.851.900
2.	Alur Bandung	Rp1.196.672.500
3.	Teluk Batang	Rp1.205.823.100
4.	Sungai Paduan	Rp1.176.862.400
5.	Banyu Abang	Rp1.205.461.100
6.	Teluk Batang Selatan	Rp1.159.065.200
7.	Teluk Batang Utara	Rp1.207.234.900
	<b>Jumlah</b>	Rp8.402.971.100

<b>Pulau Maya</b>		
1.	Tanjung Satai	Rp1.143.842.800
2.	Kemboja	Rp1.213.428.500
3.	Dusun Kecil	Rp1.195.614.300
4.	Dusun Besar	Rp1.238.347.100
5.	Satai Lestari	Rp1.205.183.600
	<b>Jumlah</b>	Rp5.996.416.300
<b>Seponti</b>		
1.	Seponti Jaya	Rp1.160.615.300
2.	Telaga Arum	Rp1.151.071.000
3.	Wonorejo	Rp1.148.542.300
4.	Podorukun	Rp1.143.564.400
5.	Sungai Sepeti	Rp1.149.179.400
6.	Durian Sebatang	Rp1.150.919.600
	<b>Jumlah</b>	Rp 6.903.892.000
<b>Kepulauan Karimata</b>		
1.	Pelapis	Rp1.154.907.400
2.	Betok Jaya	Rp1.221.810.200
3.	Padang	Rp1.154.685.200
	<b>Jumlah</b>	Rp3.531.402.800
	<b>Jumlah Keseluruhan ADD</b>	Rp50.728.212.300

Sumber: Peraturan Bupati No 3 Tahun 2020

Melalui Alokasi Dana Desa (ADD) seharusnya desa benar-benar sejahtera. Namun pada kenyataannya semua itu masih sebatas angan-angan saja. Suatu daerah/desa dalam melaksanakan hak, kewenangan, kewajibannya dalam mengelola kemampuan, potensi yang dimiliki dituntut untuk melakukan secara transparan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan kemampuan dalam pengelolaan desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan, erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang ada pada pemerintahan desa. Pemerintahan desa yang jujur merupakan harapan setiap masyarakat desa dalam mewujudkan desa untuk maju menuju perubahan lebih baik.

Ditinjau dari beberapa situasi penggunaan dana desa ini sangat rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya sudah dipercayai oleh masyarakat dalam membangun desa. Telah diketahui belum lama ini ada dugaan kasus seorang PJ Kepala Desa Matan Jaya yang tidak transparan terhadap penggunaan dana desa yang dikemukakan oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal itu tentunya menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat setempat. Ketua BPD ini juga mengatakan bahwa tentang dana desa tidak ada keterbukaan. Warga desa Matan Jaya merasa tidak mempunyai pemimpin, ungkap Dinar sebagai ketua BPD di kediamannya Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat pada 10 November 2021 (Rajawalinews.online).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka peneliti perlu untuk meneliti terkait bagaimana sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara serta mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan konsep *al-muraqabah*.

### Kajian Literatur

Desa adalah sekumpulan masyarakat yang mempunyai batas wilayah yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat sekitar berdasarkan

inisiatif masyarakat, sejarah, dan atau kelayakan konservatif yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014). Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang digambarkan bahwa desa merupakan subjek hukum yang menjadikan desa mempunyai hak dan kewajiban terhadap asset atau sumber daya yang menjadi milik desa. Karena itu dana desa yang merupakan bagian dari pendapatan desa yang mana akan menjadi milik desa sehingga prioritas penggunaan dana desa merupakan bagian dari kewenangan desa (Muhammad Mu'iz Raharjo 2020:18).

Dana desa sebagai salah satu bentuk pengalokasian dana publik yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam setiap tahun merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat Indonesia secara umum khususnya yang berada pada ruang lingkup pedesaan. Dana desa sebagai salah satu sumber keuangan publik, yang mana keuangan publik ini dimaksudkan merupakan salah satu cabang ekonomi yang membahas pengadaan, pemeliharaan, dan pengeluaran sumber-sumber yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan (Herianti dan S.Arifin, 2020:22).

Alokasi dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar desa guna untuk mendanai semua kebutuhan yang ada di desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dengan begitu maraknya otonom daerah mendorong pemerintahan desa untuk lebih memberdayakan masyarakat dan dituntut untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada baik dari dalam desa maupun dari luar desa (Ningsih Wahyu dkk., 2020:3520).

Akuntabilitas dalam aspek keuangan pemerintahan desa merupakan suatu bentuk kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana desa secara vertikal kepada pemerintah kabupaten/kota dan secara horizontal kepada masyarakat atas perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan secara berkala (Aryanti dan Andini, 2021:2). Akuntabilitas adalah sebuah bentuk kesadaran dari seorang pengelola kepentingan publik untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baik mungkin tanpa menuntut untuk di saksikan oleh pihak-pihak lain yang menjadi objek pertanggungjawaban. Perbedaan antara *responsibility* dengan *akuntability* adalah tanggung jawab dalam konteks *responsibility* ditujukan oleh seorang pengelola kepentingan publik kepada pihak-pihak lain, sedangkan tanggung jawab dalam konteks *akuntability* ditujukan oleh seorang pengelola kepentingan publik kepada dirinya sendiri (Fait dkk, 2021:104). Akuntabilitas merupakan salah satu elemen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), adanya pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat banyak (Sayuti dkk, 2018). Akuntabilitas menjadi sebuah pertanggungjawaban untuk menjawab, dan menerangkan tindakan yang telah dilakukan kepada badan hukum atau pihak yang berkepentingan untuk meminta keterangan. Prinsip-prinsip dari akuntabilitas seperti memiliki komitmen, menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten, menunjukkan tingkat pencapaian tujuan, berorientasi pada pencapaian visi dan misi dan harus jujur, objektif, transparan dan inovatif (Irfan dkk, 2021:112).

### **Konsep *Al-Muraqabah* dalam Islam**

*Muraqabah* menurut para sufi mempunyai makna adanya kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dan selalu merasa diawasi. Kesadaran inilah yang menumbuhkan sikap dengan kesiapan serta waspada bahwa ia telah diawasi oleh Allah Swt. Orang yang bermuraqabah sudah pasti selalu berusaha menata dan membina kesucian diri

beserta amalnya. Apabila *sikap muraqabah* ini telah kuat dalam jiwa seseorang, maka ia selalu menjadi budi pekerti yang sangat baik (Mubassyrirah Muhammad Bakry, 2018).

Menurut istilah, *muraqabah* mempunyai arti yakni suatu keyakinan yang dimiliki oleh individu karena Allah Swt senantiasa mengawasi, melihat, mendengar dan mengetahui semua bentuk yang telah dilakukan di setiap saat. Jika seseorang bermuraqabah artinya ia selalu yakin akan adanya pantauan Allah Swt terhadap segala gerak-geriknya dalam melaksanakan segala macam bentuk aktivitas yang dilakukannya sehingga ia menjauhi semua larangan. Kesadaran itu sendiri lahir dari bukti keimanan bahwa Allah Swt dengan sifat ilmu, bashar dan sama' (mengetahui, melihat dan mendengar). Mengetahui tentang apa-apa saja yang dilakukan kapan dan dimana saja. Ia mengetahui apa yang dipikirkan dan dirasakan (Rahman, 2014).

Konsep dari *muraqabah* yang lebih terperinci di kemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, beliau menyebutkan *muraqabah* ialah pengetahuan dan keyakinan seseorang adanya pengawasan dari Allah Swt yang senantiasa terjaga baik lahir maupun batin. Hasil dari mengamalkan konsep *muraqabah* ini adalah lahirnya pengetahuan bahwa Allah Swt senantiasa melihat dan mendengarnya, mengawasi semua amalannya disetiap saat, setiap nafas dan setiap kejapan mata (Khailurrahman, 2013). Lebih lanjut, bentuk penghambaan atau ibadah dengan nama-nama Allah Swt yaitu ar-Raqib (yang maha mengawasi), al-Hafidz (yang maha menjaga), al-Alim (yang maha mengetahui), as-Sami' (yang maha mendengar), dan al-Bashir (yang maha melihat) (Khailurrahman, 2013). Dalam istilah dari Tasawwuf menurut al-Qusyairi *muraqabah* mempunyai arti kondisi seseorang yang meyakinkan terhadap diri sendiri karena Allah Swt selalu melihat dan selalu mengawasi gerak-gerik kita dimanapun dan kapanpun kita berada dan bahkan Allah juga mengetahui apa yang terlintas di dalam hati kita (Insanul, 2017).

Berikut ini adalah beberapa faktor yang mendukung adanya konsep muraqabah dalam Islam.

a. Ilmu Pengetahuan

Ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang. Dalam hal ini Allah Swt adalah sumber ilmu itu sendiri sedangkan manusia sebagai penerima dari ilmu (Nawi, 2012). Ilmu dan akal sehat yang dimiliki manusia menjadikannya dapat menilai bahwa segala perbuatan baik seperti jujur, adil dan berakhlak mulia adalah hal wajib untuk dilakukan (Ainiyah dan Karsiyah, 2017).

b. Ibadah

Ibadah meruapakan bentuk ketundukan serta kepatuhan kepada-Nya yang tercermin dalam berbagai peribadatan seperti shalat, puasa, zakat, haji. Karenanya, ibadah hanya akan dilakukan oleh seseorang yang memiliki kesadaran akan kehadiran Allah Swt (Amran, 2012).

c. Akhlak

Akhlak merupakan inti dari ibadah, seseorang yang mempunyai akhlak yang baik terlihat dari perilakunya yang taat beribadah dilingkungan di mana ia berada (Amran, 2012).

## **Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan dari Alokasi Dana Desa (ADD)**

Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa

1. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB desa kepada kepala Desa
2. Rancangan peraturan desa tentang APB desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

3. Rancangan peraturan desa tentang APB desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

#### Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati atau Wali Kota.
2. Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur keuangan.
3. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen dengan tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

#### Tahap pertanggungjawaban dari Alokasi Dana Desa

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB desa kepada Bupati /Wali kota melalui Camat setia akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
3. Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
  - a) Laporan keuangan, terdiri atas:
    - 1) Laporan realisasi APB desa;
  - b) Laporan realisasi kegiatan; dan
  - c) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

#### Tahap Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Pemerintahan daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada desa.
2. Bupati/Wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP daerah kabupaten/kota.

### **Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif *Al-Muraqabah***

Hadirnya konsep *muraqabah* ini yang dimaksudkan dalam membingkai tata kelola keuangan desa seperti akuntabilitas dan transparansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islamiyah yang menanamkan nilai-nilai ketaatan, kejujuran dan nilai saling tolong menolong semata-mata mengharapkan ridho Allah Swt. Jadi, dengan konsep *muraqabah* dalam pengelolaan dana desa ini adalah semata-mata untuk menumbuhkan kesadaran aparat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik tanpa harus merugikan Negara dan masyarakat terhadap kesalahan yang telah diperbuat dengan sengaja dilakukan dan menyimpang dari aturan negara yang berlaku maupun agama (Rahman, 2014:29).

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian adalah deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini untuk mendeskripsikan gambaran atau fenomena yang terjadi pada pengelolaan dana desa khususnya pada Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir kabupaten Kayong Utara. Oleh karena merupakan gambaran dari sebuah fenomena. Menurut (Moleong 2017:15) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk

mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di kantor desa yang berlokasi di Jl. Pantai Utara, RT 09 RW 03, desa Nipah Kuning, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat 78853. Yaitu mendatangi langsung pihak yang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan desa (ADD).

### **Sumber Data**

Menurut Sugiyono (2019:245) sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dengan cara melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan terhadap pengelolaan dana desa yang ada pada desa Nipah Kuning secara langsung. Adapun sumber data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung dari hasil wawancara sumber informasi yang sudah memberikan data yaitu mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.
2. Data sekunder adalah data yang bersumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti melalui perantara orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono,2020:104). Adapun data sekunder yang akan digunakan adalah data yang sebelumnya memang sudah ada sehingga data tersebut bisa menjadi data penguat bagi peneliti. Data sekunder yang dimaksudkan adalah data tentang keuangan desa yang meliputi data APBdes dan data pendukung lainnya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2019:195) teknik pengumpulan data ada beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Observasi yaitu mempunyai teknik analisis data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya yaitu melakukan pengamatan secara langsung. Observasi yang dilakukan peneliti berada di kantor desa Nipah Kuning. Yaitu mendatangi langsung pihak-pihak yang bersangkutan dengan pengelolaan alokasi dana desa dengan menggunakan alat penelitian pedoman observasi.
2. Wawancara yaitu cara mengumpulkan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden atau narasumber. Penelitian ini menggunakan wawancara secara tidak terstruktur. Arah utama wawancara yang digunakan hanya inti dari permasalahan yang akan ditanyakan peneliti kepada pemerintah desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa yang mana mereka yang memegang tanggung jawab dari pengelolaan alokasi dana desa di desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara.
3. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, foto- foto dan laporan dari kegiatan. Studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan dokumen seperti data keuangan desa, APBDes yang di muat dalam siskudes.

### **Alat Pengumpulan Data**

Penelitian kali ini peneliti menyusun pertanyaan sebagai pedoman untuk melakukan wawancara yang akan ditanyakan langsung kepada informan yang terlibat dalam pengelolaan dana desa yang dibantu dengan alat perekam handphone, buku catatan dan pulpen.

### **Teknik Analisis Data**

Bungin (2007:73) mengatakan bahwa teknik analisis data yang digunakan tergantung pada pendekatan penelitian. Jadi pendekatan penelitian ini ialah pendekatan *fenomenologi*. Dalam melaksanakan analisis dalam sebuah data dengan tujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan yang dilakukan peneliti dalam proses wawancara. Berikut teknik analisis data yang dilakukan.

1. Pada langkah awal peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran secara menyeluruh tentang berbagai fenomena yang sudah didapatkan.
2. Mulai membaca data secara menyeluruh dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting yang kemudian dilakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang telah dirasakan oleh responden dengan melakukan horizontaliting yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama.
4. Pernyataan tersebut kemudian dikumpulkan ke dalam unit makna lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut bisa terjadi.
5. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena tersebut sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut.
6. Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman responden mengenai fenomena tersebut.

### **Pengujian Keabsahan Data**

Menurut Patton (dalam Moleong 2017:331), untuk menguji keabsahan data yang diperoleh maka digunakan teknik Triangulasi Data. Jenis triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam kualitatif, hal ini dapat dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 2. Membandingkan apa yang dikatakan informan-informan didepan umum dengan yang diucapkan secara pribadi; 3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan masalah peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Nipah Kuning**

Akuntabilitas dari pengelolaan dana desa sudah dijalankan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundangan yang ada. Sejauh ini jika dilihat pemerintah desa sudah menerapkan dengan baik dengan beberapa bukti jawaban dari pertanyaan penelitian terkait transparansi dan partisipasi dari pengelolaannya. Dengan adanya keterbukaan dari pengelolaan dana desa membuat masyarakat yakin bahwa dana desa sudah dilaokasikan dengan baik sehingga masyarakat tidak ada pikiran dan hal-hal negatif lainnya yang tidak diinginkan oleh pemerintahan desa.

#### **1. Perencanaan Alokasi Dana Desa**

Pada perencanaan alokasi dana desa ini pemerintahan desa sudah menerapkan prinsip partisipatif dengan melibatkan masyarakat, lembaga dan kemudian unsur-unsur mitra seperti kecamatan, pendamping desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintahan desa dan juga turut mengundang pihak sekolahan yang ada di desa agar jelas apa yang mau di usulkan dari kegiatan ADD ini. Kemudian rebug warga itu di ajukan ke BPD, setelah BPD dapat usulan dari lima dusun yang ada di desa Nipah Kuning ini lanjut lagi rapat musyawarah di desa yaitu musdes dilaksanakan oleh BPD. Dari musdes itulah sehingga dapat memilah yang jadi prioritas baik itu sesuai ketentuan

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan prioritas-prioritas yang diperlukan untuk desa yang sesuai dengan sumber keuangan desa. kemudian hasil dari musdes tersebut dibawa lagi ke musrenbangdes. Jadi dengan musrenbangdes inilah jadi penentuan yang mana tidak tercover oleh pemerintah desa kemudian diajukan ke pihak kabupaten maupun provinsi dan pusat, intinya seperti usulan. Terus yang mampu di cover oleh desa kemudian dimasukkan di dalam rancangan atau RKP di tahun berjalan atau tahun berikutnya. Jadi, dari RKP tersebut dasar dari penyusunan APBdes (Anggaran dan Pendapatan Belanja desa). jadi, mengacu pada hasil yang dimuat di dalam musrenbangdes kemudian dimasukkan ke dalam RKP itulah yang dimasukkan ke dalam APBdes itu untuk alur dari perencanaannya.

Mekanisme perencanaan alokasi dana desa dapat dijabarkan berikut ini:

- a) Sekretaris desa menyusun rancangan tentang APBDes bersama kaur dan kasi yang biasa disebut tim PPKD. Setelah rancangannya selesai sekretaris desa menyampaikan rancangan berupa penetapan APBDes yang kemudian rancangan tersebut diserahkan kepada kepala desa apakah sudah sesuai dengan keinginan kepala desa dan program-program yang akan buat.
- b) Rancangan yang telah di susun pada ayat (1) yang kemudian akan disampaikan kepala desa kepada BPD untuk di bahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD yang dihadiri oleh kepala desa beserta staf nya dan anggota BPD.
- c) Rancangan peraturan desa tentang APB desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Jadi, menurut informan yaitu sekretaris desa beliau menyampaikan bahwa mereka selalu mempercepat prosesnya pada bulan empat atau bulan lima itu sudah diselesaikan. Jadi, tidak sampai bulan Oktober tahun berjalan.

## 2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana dari desa yang mempunyai tugas menyusun rencana penggunaan ADD yang mengacu pada hasil musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa). kemudian menyusun jadwal pencairan dana untuk membiayai beberapa kegiatan. pelaksanaan kegiatan di desa itu terdiri dari beberapa bidang terutama bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan. Jadi, untuk penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan kegiatannya tetap di desa untuk mengetahui lokasi sesuai dengan bidang masing-masing.

Mekanisme dari pelaksanaan alokasi dana desa dapat dijabarkan berikut ini:

- a) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ini merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui Bank Kalbar dari rekening kas desa berupa Giro.
- b) Pencairan dari dana desa ini dilakukan oleh kepala desa dan bendahara desa. Jika hanya salah satu dari mereka maka tidak bisa melakukan pencairan dana desa di bank karena wajib bagi kepala desa dan bendahara desa yang melakukan pencairan.

## 3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban ADD ini sepenuhnya dipegang oleh kepala desa karena beberapa laporan tentang realisasi pelaksanaan dari APBDes harus dilaporkan kepada bupati /wali kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Pertanggungjawaban dari APBDes di desa Nipah Kuning sudah melengkapi baik fisik maupun administrasi. Dengan ini diharapkan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap pelaksanaan dari ADD. Dalam hal ini juga diharapkan kepada

pemerintah desa agar selalu menerima segala masukan dari masyarakat dalam forum musyawarah desa agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

**Tabel 4.4**  
**Hasil sarana dan prasarana yang dibangun dengan ADD Tahun 2020**

No	Sarana yang dibangun	Hasil
1.	Peningkatan gedung kantor desa	100% Baik
2.	Rehabilitasi teras masjid Al-Ikhlas di dusun Sinar Utara	100% Baik
3.	Rehabilitasi lanjutan pembangunan surau di dusun Sungai Jambu	100% Baik
4.	Pembangunan tempat wudhu masjid As-Syuhada	100% Baik
5.	Pemeliharaan surau Nurul Huda di dusun Sinar Utara	100% Baik
6.	Lanjutan rehabilitasi masjid Al-Ikhlas di dusun Sinar Karya	100% Baik

Sumber: Desa Nipah Kuning (diolah)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di setiap dusun rata-rata sudah baik secara fisik dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara administrasi perlu dilakukannya perbaikan untuk kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitasnya. Dengan melakukan prinsip akuntabilitas maka akan membuat masyarakat percaya terhadap pembangunan desanya. Pelaksanaan dari prinsip akuntabilitas juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes desa dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Data Pembangunan Desa Nipah Kuning Tahun 2020**

No	Pembangunan	ADD (RP)
1.	Peningkatan gedung kantor desa	41.857.490,00
2.	Rehabilitasi teras masjid Al-Ikhlas di dusun Sinar Utara	30.000.500,00
3.	Rehabilitasi lanjutan pembangunan surau di dusun Sungai Jambu	19.995.000,00
4.	Pembangunan tempat wudhu masjid As-Syuhada	30.000.000,00
5.	Pemeliharaan surau Nurul Huda di dusun Sinar Utara	19.997.600,00
6.	Lanjutan rehabilitasi masjid Al-Ikhlas di dusun Sinar Karya	18.600.500,00

Sumber: Desa Nipah Kuning tahun 2020 (diolah)

Data tersebut menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban dari APBDes di desa Nipah Kuning sudah melengkapi baik fisik maupun administrasi. Dengan ini diharapkan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap pelaksanaan dari ADD. Dalam hal ini juga diharapkan kepada pemerintah desa agar selalu menerima segala masukan dari masyarakat dalam forum musyawarah desa agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

#### 4. Pengawasan Alokasi Dana Desa

Bentuk pengawasan di desa setiap tahunnya hanya melibatkan pengawasan dari internal desa seperti BPD, Rt, Rw dan masyarakat yang turut serta mau membantu proses pengawasan dari ADD. Dikarenakan untuk saat ini belum ada pihak dari kecamatan/kabupaten yang turun ke lapangan. Dengan hal ini dapat dikatakan pengawasan ADD di desa Nipah Kuning ini dapat dikatakan belum efektif karena hanya melibatkan warga desa saja.

## Upaya Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Pengelolaan Dana Berdasarkan Konsep *Al-Muraqabah*

Beberapa upaya dari pemerintah yaitu dengan cara menerapkan nilai-nilai kebaikan, ketaatan dan kejujuran terhadap proses dari pengalokasian dana desa sehingga masyarakat yakin bahwa apa yang telah dilakukan itu sesuai dengan akidah dan tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan desa. pemerintah desa juga menerangkan pada saat wawancara bahwa dana dari ADD ini juga digunakan untuk mendanai kegiatan Islamiah yang dilakukan pada saat hari-hari besar seperti Maulid Nabi dan kegiatan majlis taklim yang ada di surau dan masjid yang ada di desa Nipah Kuning.

### KESIMPULAN

1. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dari pengelolaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sudah dilaksanakan secara baik sesuai dengan peraturan Permendagri No 20 Tahun 2018 sudah dilaksanakan dengan prinsip transparansi, partisipasi dan keterbukaan kepada masyarakat, hanya saja ada beberapa masyarakat yang kurang ikut serta dalam proses perencanaan dengan tidak menghadiri rapat walaupun sudah ada undangan. Begitu juga pada tahap pengawasan dari ADD nya kurang efektif dikarenakan pada pengawasan hanya mengandalkan masyarakat dalam desa sedangkan pihak kecamatan dan kabupaten tidak ikut serta turun dalam pengawasan.
2. Upaya pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa dalam konsep *al-muraqabah* itu dibuktikan dengan dari segi kejujuran mereka sudah melakukannya sesuai dengan peraturan yang ada kemudian di publikasikan informasi tentang keuangan desa kepada masyarakat, kemudian, dari segi kebaikan mereka selaku pemerintah desa selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan bekerja secara professional dalam kinerja dengan penuh tanggung jawab dan yang terakhir dari segi ketaatan mereka selalu menyadari akan pengawasan atau pantauan dari Allah swt akan segala sikap dan prilaku. Maka dari itulah mereka selalu patuh dalam prinsip pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa juga mendanai beberapa acara Islamiyah seperti hari besar islam seperti Maulid Nabi dana cara ceramah-ceramah lainnya yang ada di desa Nipah Kuning.

### SARAN

Berdasarkan pembahasan penelitian diatas mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam perspektif *al-muraqabah*, maka terdapat beberapa saran yang bisa peneliti sampaikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Ada baiknya bagi pemerintah desa sering mengikuti pelatihan agar tidak kesusahan saat membuat laporan pertanggungjawaban administrasi.
2. Pemerintah desa diharapkan selalu terbuka kepada masyarakat atas laporan kegiatan pelaksanaan pembangunan agar masyarakat tidak berprasangka buruk atas dana-dana yang telah dikeluarkan untuk pembangunan masing-masing dusun.
3. Pemerintah desa juga harus selalu berada dikantor desa ketika masyarakat membutuhkan segala keperluan yang akan diurus sehingga mereka merasa yakin akan tanggung jawab dari pemerintah desa kepada masyarakat.
4. Perlu adanya pengawasan ADD dari luar seperti mitra kecamatan dan kabupaten.

## REFERENSI

- Aryanti, F.I., & Andini, D.P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 1(1), 1-11.
- Apriliani, S. G. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Bamyuwangi Tahun 2013.
- Bakry, M.M. (2018). Maqamat, Ahwal dan Konsep Mahabbah Ilahiyah Rabi'ah Al-Adawiyah (Suatu Kajian Tasawuf). *Al Asas*, 1(2), 76-101.
- Bungin, Burhan., 2017, *Penelitian Kualitatif*, Prenada Meda Group, Jakarta.
- Fait, T., Septiana, A. R., & Tohopi, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sawala: *Jurnal Administrasi Negara*, 9(1), 102-114.
- Herianti, H., & Arifin, S. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa TA 2018 di Kecamatan Palakka Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah: Ilmu Ekonomi dan Keuangan (Konvensional dan Syariah)*, 3(!), 21-42.
- Irfan, I., Majid, J., Umar, M., & Aditiya, R. (2021) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Al-Muraqabah. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(1), 108-121.
- Kusuma dan Riharjo. 2020. "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran".
- Kurniati. 2022. *Desain Sistem Informasi Akuntansi Perusahaan Jasa Konstruksi dan Laporan Keuangan Berstandar SAK ETAP* (Studi Kasus di PT Indoyasa Mandiri Pratama).
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa KeOdungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). *Jurnal Ekonomika Bisnis*, 7(2), 143-182.
- Kurniawan, H., Made, A., & Yogivaria, D. W. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Stusi Kasus di Desa Sukowilangun Kecamatan kalipare Kabupaten Malang tahun 2014). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*,4(1).
- Manisa, S.F., Manaroinsong, J., & Sumual, M. (2020). Akuntabilitas dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa:(Studi Kasus pada Desa Talawaan Atas, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2020, 8-12.
- Muslimin, M., Mappamiring, M., & Nurmaeta, S. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- Malumperas, M. H., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).
- Muhammad Mu'iz Raharjo. 2020. *Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta Timur: Penerbit PT Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J., 2017, *Metode Penelitian kualitatif*, Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3517-3532.

- Nawi, N. H. M. (2012). *Islamisasi Kurikulum pendidikan Islam di Institusi pendidikan guru: tribulasi dan cadangan*.
- Onsardi, O., Marini, M., & Selvia, E. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara). *Billancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 248-261.
- Pangesti, M.D. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
- Peraturan Perundang-undangan:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendesa Nomor 5 Tahun 2015
- Peraturan Bupati Kayong utara Nomor 3 Tahun 2020
- Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016
- Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 55 Tahun 2020
- Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayanmakmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1-14.
- Sujarweni, Wiratna V. 2015. *Akuntansi Desa*. Pustaka baru press, Yogyakarta
- Siregar, R., & Ratna Sari Dewi, H. (2020, December). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Medan Senembah. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 3, No. 1, pp. 398-404).
- Savitri, E., Andreas, A., & Diyanto, V. (2019). Accountability Of Village Funds Manajement. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 17(3), 515-521.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019.
- Syahdatina, R. (2017). Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 2(1), 1-18.
- Sjamsiar Sj. 2020. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Yasir, A.R. (2014). Implementasi Konsep Muahadah Mujahadah, Muraqabah, Muhasabah dan Mu'aqabah Dalam Layanan Customer. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2): 123-134.

Internet:

- Redaksi Rajawalinews, *BPD Laporkan Pengkhianat "Pj.Kades Dan Sekdes Desa Matan Jaya" Ke Polisi Indikasi Korupsi Duit BLT-DD*. Diakses 10 April 2022. Sumber: <https://rajawalinews.online/2021/11/13/bpd-laporkan-pengkhianat-pj-kades-dan-sekdes-desa-matan-jaya-ke-polisi-indikasi-korupsi-duit-blt-dd/>